

# SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 31/Julii 2018



Ikuti  
Kuis BPIW  
di hal.65

## Infrastruktur PUPR Penunjang Pengembangan Kawasan Perdesaan

Mengembangkan Tanjung Lesung Menjadi "Bali Baru"



BPIW • Kementerian PUPR



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**



**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)  
Telp. +6221-2751 5804



## **Salam Sinergi** .....

Pembaca setia Sinergi. Buletin Sinergi sudah memasuki edisi Juli 2018. Pada edisi bulan pertama di semester II tahun 2018 ini, redaksi mengangkat Kabar Utama terkait pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Tanah Air.

Kemudian untuk rubrik Wawancara menampilkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR yang baru, Hadi Suahyono. Dalam rubrik tersebut, disampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjadikan BPIW sebagai pedoman perencanaan bagi unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu, ada juga rubrik Laporan Khusus. Pada rubrik tersebut redaksi membahas program pengembangan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Tanjung Lesung di Banten. Kawasan wisata tersebut memiliki pesona alam yang luar biasa.

Kemudian untuk kegiatan strategis yang dilaksanakan jajaran BPIW, akan diekspos melalui berita dalam rubrik Kilas BPIW.

Pada rubrik Sosok mengangkat profil dan sisi lain salah satu pejabat di BPIW. Kali ini sosok yang ditampilkan yakni Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT.

Selain itu hadir rubrik Potret yang berisi dokumentasi dari kegiatan partisipasi Pameran BPIW di *Expo 2018 Urbanscape* serta kegiatan serah terima jabatan di lingkungan BPIW. Rubrik ringan tetap mewarnai Sinergi edisi ini seperti Serba-serbi yang membahas mengenai 5 Besar dari 15 Pulau Terbaik Dunia dan rubrik Tips yang mengupas tentang 7 Tips Menghadapi "Monday Blues".

Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalan yang membahas keindahan Kepulauan Kei Maluku Tenggara dan ulasan berita yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.

Kami berharap edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca setia Sinergi serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

**Pemimpin Redaksi**

**Tim Penyusun:**

**Pelindung:**

Hadi Sucahyono

**Pengarah:**

Firman Hatorangan Napitupulu

**Penasehat**

Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Kuswardono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:**

P. Yudantoro

**Redaktur Pelaksana:**

Shoviah

**Editor :**

Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**

Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Alis Listalatu  
Rian Farhan  
Fitri Selva

**Sekretariat:**

Untung Priyono  
Nur Wahyu

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  
Kementerian PUPR

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id  
Website: bpiw.pu.go.id  
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design : Heri Hito  
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



**04 Kabar Utama:**  
Infrastruktur PUPR Penunjang  
Pengembangan Kawasan Perdesaan



**56 Serba Serbi**  
Inilah 5 Besar dari 15 Pulau Terbaik Dunia  
Versi *Travel and Leisure*



**10 Wawancara:**  
Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D  
Produk BPIW Perlu Disosialisasikan  
Secara Reguler



**60 Teknologi:**  
Pengembangan dan Penerapan *Upgrading*  
Instalasi Pengolahan Air



**37 Lapsus:**  
Mengembangkan Tanjung Lesung  
Menjadi "Bali Baru"



**62 Potret:**  
BPIW Ikuti Expo 2018 *Urbanscape*

# Infrastruktur PUPR Penunjang Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kawasan perkotaan yang terus berkembang perlu diimbangi dengan pengembangan kawasan perdesaan. Untuk lebih meningkatkan potensi yang dimiliki kawasan perdesaan, pemerintah menetapkan 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut andil menyusun masterplan KPPN di beberapa daerah. Pembangunan perdesaan yang tertuang dalam rencana induk tersebut harus mempertimbangkan terjaganya kelestarian lingkungan perdesaan.



Sarana jalan penghubung desa di Sidrap Sulawesi selatan

Sumber: Shutterstock



Aktifitas petani di Kabupaten Ngada NTT.

Sumber: BPIW

Membangun kawasan perdesaan perlu dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan perdesaan. Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono hal itu penting, karena kawasan perdesaan merupakan pilar, mengingat hasil produksi pertanian dan perkebunan dihasilkan di perdesaan beberapa waktu lalu. "Pembangunan infrastruktur harus menjaga kondisi perdesaan tetap terjaga. Jadi jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menghilangkan eksistensi kawasan perdesaan yang asri. Disisi lain, Kementerian PUPR juga tetap menyeimbangkan pembangunan perkotaan dengan perdesaan," tutur Hadi.

Program yang dimiliki Kementerian PUPR menurut Hadi menunjang agropolitan atau kawasan khusus pertanian. Pembangunan infrastruktur perumahan juga dapat disesuaikan dengan kondisi perdesaan, di mana harga rumah dapat diberikan dengan harga yang rendah. Selain itu program bedah rumah juga diterapkan di perdesaan.

Terkait program KPPN, menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) telah menetapkan 40 KPPN yang tersebar di 60 kabupaten di seluruh Indonesia. Pengembangan KPPN dilakukan dengan mengacu pada ketetapan lokasi tersebut.

Fokus pengembangan kawasan perdesaan diarahkan pada tiga sektor yaitu pada sektor sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran. Sebagai sentra produksi, kawasan perdesaan difokuskan untuk dapat mengidentifikasi dan menentukan komoditas-komoditas unggulan yang akan menjadi basis ekonomi kawasan.

Sebagai sentra pengolahan, kawasan perdesaan dikembangkan dengan tidak hanya menjual *raw material* (bahan baku) tetapi juga harus dapat melakukan pengolahan-pengolahan yang dapat meningkatkan *added value* (nilai tambah) dari komoditas unggulan sehingga dapat menghasilkan nilai jual produk yang tinggi.

Sebagai sentra pemasaran, kawasan perdesaan harus mampu memasarkan produk-produk unggulan mereka dengan mengembangkan pusat-pusat pemasaran di perdesaan dan juga dengan membangun keterkaitan dengan perkotaan (*urban rural linkage*) terdekat sebagai pusat pemasaran produk-produk unggulan perdesaan.

*"Pembangunan infrastruktur harus menjaga kondisi perdesaan tetap terjaga. Jadi jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menghilangkan eksistensi kawasan perdesaan yang asri. Disisi lain, Kementerian PUPR juga tetap menyeimbangkan pembangunan perkotaan dengan perdesaan," tutur Hadi.*



Potensi Pertanian di KPPN Konawe Selatan.

Sumber: BPIW

Dalam pengembangan kawasan perdesaan menurut Agusta Kementerian PUPR mengawalinya dengan penentuan tipologi desa di Indonesia dan pada akhirnya mengarah pada terjadinya pembangunan fisik. Diharapkan desa-desa yang ada, dapat menjadi desa mandiri. Selain itu diperlukan kolaborasi lintas instansi yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk merealisasikan dukungan tersebut BPIW telah menyusun *masterplan* KPPN. Tujuan dari penyusunan KPPN tersebut adalah tersusunnya *masterplan* yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (3-5 tahunan), dan jangka pendek (1-3 tahun).

Sejak 2016, BPIW telah menyusun 10 *masterplan* KPPN, dimana empat lokasi selesai tahun 2016 dan sepuluh lokasi selesai disusun pada tahun 2017. Pada tahun anggaran 2018 ini, BPIW tengah menyusun *masterplan* keterpaduan perencanaan infrastruktur KPPN di enam lokasi lainnya, meliputi Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Ngada, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Muna Barat, serta Kabupaten Konawe Selatan. Berikut rincian keenam KPPN tersebut :

### 1. KPPN Raha Kabupaten Muna Barat

KPPN Raha Kabupaten Muna Barat terletak Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan delapan desa di Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Selatan. Terdapat tiga desa di Kecamatan Maginti dan juga lima desa di Kecamatan Tiworo Selatan yang menjadi fokus penyusunan *masterplan*.

Konsep pengembangan kawasan di KPPN Raha Kabupaten Muna Barat ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi fungsi sentra produksi, pengolahan, dan distribusi komoditas padi dengan rencana pembangunan pusat pengolahan hasil pertanian yakni *rice milling* unit, lantai jemur, dan unit pengolahan pakan ternak.

Selain sektor pertanian, sektor perikanan di KPPN Raha Kabupaten Muna Barat juga dikembangkan sebagai dukungan bagi komoditas unggulan kawasan. Budidaya ikan menjadi andalan dengan komoditas udang dan ikan bandeng. Untuk mendukung komoditas unggulan tersebut diadakan rencana pembangunan gedung *cold storage* guna dioptimalkan sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan.

Sedangkan untuk sentra produksi, sebagai penghasil utama produk pertanian dan

Tujuan dari penyusunan KPPN tersebut adalah tersusunnya *masterplan* yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (3-5 tahunan), dan jangka pendek (1-3 tahun).

## PROFIL INFRASTRUKTUR KPPN KAB. MUNA BARAT



Panjang Jalan dilihat berdasarkan kondisi jalan di KPPN Muna Barat **Kondisi Baik 27,86 Km** dan dalam **Kondisi Rusak 36,63 Km**



KPPN Muna Barat terbagi dalam **4 (empat) Daerah Aliran Sungai** yaitu **DAS Katangana Bone-Bone, DAS Bonegkeputeh, DAS Kasimpa, dan DAS Tanjung**



Pelayanan air bersih di KPPN Muna Barat terbagi sebagai berikut:

**Sumur Bor: 1.794 Rumah**  
**Sumur Bantuan Pemerintah: 387 Rumah**



Pelayanan listrik di KPPN Muna Barat terbagi sebagai berikut:

**Listrik PLN: 1.525 Rumah**  
**Listrik Non PLN: 119 Rumah**  
**Tidak Ada Listrik: 447 Rumah**



Jangkauan **akses telekomunikasi** di wilayah KPPN Muna Barat **baru mencakup** beberapa Desa, diantaranya adalah **Desa kasimpa Jaya, Katangana, Parura Jaya, dan Pajala**. Sedangkan untuk **desa lainnya hanya titik tertentu** pada desa tersebut yang terdapat akses telekomunikasi

perikanan dilakukan dengan rencana penguatan sistem produksi melalui pembangunan infrastruktur pendukung (JUT, irigasi sawah dan tambak).

### 2. KPPN Sambas Kabupaten Bengkayang

KPPN Sambas Kabupaten Bengkayang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi KPPN ini berada di Kecamatan Ledo yang terdiri dari 12 Desa sebagai lokasi yang menjadi fokus penyusunan *Masterplan*.

Potensi utama di KPPN ini adalah karet, lada, kelapa sawit, padi, dan jagung dengan jumlah produksi tertinggi yaitu sawit. Konsep pengembangan kawasan di KPPN Sambas Kabupaten Bengkayang ini ditujukan untuk mendukung komoditas unggulan yang terbagi menjadi dua *cluster* pengembangan yaitu *cluster* utara dengan komoditas unggulan sawit, jagung, padi dan *cluster* selatan dengan komoditas unggulan jagung.

Pada *cluster* utara akan dilakukan penguatan sistem produksi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur di setiap sentra produksi dan untuk *cluster* selatan dilakukan

penguatan sistem produksi dengan melakukan pembangunan infrastruktur penunjang produksi berupa jalan produksi dan konektivitas antarwilayah di setiap sentra produksi.

Dengan kondisi yang ada, maka direncanakan dibangun Pusat Pengolahan Pertanian Terpadu yakni mencakup pusat pengolahan jagung (pakan ternak), *packaging* jagung pipil, dan pengolahan sisa sampah sawit untuk pupuk organik.

### 3. KPPN Kolonedale Kabupaten Konawe Selatan

KPPN Kolonedale Kabupaten Konawe Selatan ini terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi KPPN ini terletak di Kecamatan Tinanggea dan terdiri dari 14 desa.

Kabupaten ini memiliki beberapa komoditas unggulan seperti padi, kelapa, rumput laut, kepiting rajungan, udang, dan terasi. Dengan potensi yang ada, maka konsep pengembangan KPPN Kolonedale Kabupaten Konawe Selatan ini berupa rencana pengembangan jalan usaha tani antardesa

Konsep pengembangan kawasan di KPPN Sambas Kabupaten Bengkayang ini ditujukan untuk mendukung komoditas unggulan yang terbagi menjadi dua cluster pengembangan yaitu cluster utara dengan komoditas unggulan sawit, jagung, padi dan cluster selatan dengan komoditas unggulan jagung.



Kondisi salah satu Embung di KPPN Lombok Tengah.

Sumber: BPIW

di poros utara dan pengembangan jalan produksi tambak antar desa poros selatan. Selain itu, terdapat rencana pengembangan jalan produksi tambak sekaligus tanggul penahan banjir rob dan abrasi serta pembangunan jembatan titian ke kampung atas air desa bungin permai.

**5. KPPN Praya Kabupaten Lombok Tengah**

KPPN Praya Kabupaten Lombok Tengah ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun fokus lokasi penyusunan *masterplan* pada KPPN ini yaitu enam desa di Kecamatan Praya Barat, dua desa di Kecamatan Pujut, dan satu desa di Kecamatan Praya Barat Daya.

Komoditas unggulan di KPPN ini yaitu kelapa, jati, jambu mete, padi, dan jagung. Selain potensi pertanian, terdapat juga potensi pariwisata. Terdapat lima pantai di lokasi KPPN ini yaitu Pantai Selong Belanak, Pantai Mawi, Pantai Tambah Lancing, Pantai Mawun, Pantai Areguling, dan Pantai Batu Bankai.

Beberapa rencana program pembangunan infrastruktur di daerah ini adalah sistem penanganan persampahan berbasis masyarakat, perbaikan embung, dan pembangunan bangunan pelengkap jalan penghubung desa. Kemudian juga direncanakan sistem pengelolaan drainase lingkungan, pembinaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan, dan pemeliharaan berkala embung.

**6. KPPN Ende Kabupaten Ngada**

KPPN Ende Kabupaten Ngada berada di Kecamatan Soa, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 14 desa. Potensi yang ada di daerah ini berupa pertanian tanaman pangan, dimana hasil utamanya yakni padi, jagung, dan kacang-kacangan. Kemudian ada juga potensi perkebunan, dimana komoditas unggulannya yaitu jambu mete, kemiri, dan kakao.

Sedangkan dari sisi infrastruktur, kondisi infrastruktur yang ada di KPPN Kabupaten Ngada antara lain jaringan irigasi yang panjangnya mencapai kurang lebih 1.034,5 km melayani 1.559 ha luas areal irigasi potensial dan 939 ha luas areal irigasi fungsional. Sementara sumber air irigasi berasal dari Kali Waepana, Waetawo, Mata Hoba, Furufugha, dan Matakoko.

Dengan kondisi tersebut, maka strategi pembangunan yang dapat dilakukan berupa peningkatan produksi padi sawah melalui perluasan dan rehabilitasi kawasan irigasi.

Dari sisi infrastruktur jalan, di mana jalan dalam kondisi baik mencapai kurang lebih 43,25 km. Sedangkan jalan kondisi rusak ringan mencapai kurang lebih 4,51 km dan rusak berat mencapai 38,19 km. Perbaikan jalan diperlukan untuk melancarkan pemasaran produk hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian dari segi hunian, perlu dilakukan perbaikan terhadap kurang

**POTENSI UTAMA KPPN BOALEMO**

Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Nilai Jual
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi	6.201	33.564	5,413	* 7500 - 8000
Jagung	14.359	66.678	4,644	** 2700 - 3000

\* 7500 - 8000 : Harga Jual Beras  
 \*\* 2700 - 3000 : Harga Jual Jagung Pipil

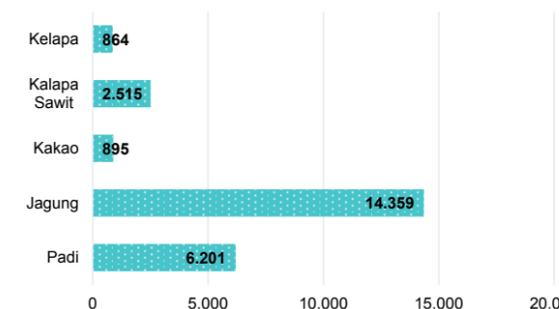
Sumber: Wonosari Dalam Angka, 2017 - Bappeda Kab. Boalemo



- ❑ Jagung dan Padi merupakan 2 komoditas dengan luas panen paling dominan di Kecamatan Wonosari dibandingkan dengan kelapa sawit, kelapa, dan kakao.
- ❑ Kontribusi luas tanam komoditas padi Kec. Wonosari terhadap Kabupaten Boalemo yaitu 62,1 %, sedangkan Komoditas Jagung memberikan kontribusi sebesar 47,3 %.
- ❑ Kabupaten Boalemo telah surplus beras, skala ekspor masih skala provinsi yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara (Manado)



**LUAS PANEN KOMODITAS UTAMA WONOSARI (HA)**



Sumber: Wonosari Dalam Angka, 2017 - Bappeda Kab. Boalemo

lebih 173 unit rumah tidak layak huni.

**7. KPPN Kwandang Kabupaten Boalemo**

KPPN Kwandang Kabupaten Boalemo berada Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Wonosari, berjumlah 6 desa. Lokasi KPPN ini Berada di sekitar KTM Pawonsari dan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) transmigrasi. Secara fisik kawasan, diketahui bahwa sektor unggulan di KPPN ini ada pada sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas padi sawah dan jagung.

Kedua komoditas ini merupakan komoditas dengan luas panen dan produktivitas paling dominan di Kecamatan Wonosari dibandingkan dengan kelapa sawit, kelapa, dan kakao.

Beberapa permasalahan yang ada di KPPN ini diantaranya potensi lumbung pangan yang belum optimal, pengembangan komoditas unggulan yang belum optimal, rendahnya tingkat nilai pelayanan infrastruktur dan rendahnya kualitas SDM dan kurangnya peran kelembagaan agribisnis.

Untuk menghadapi hal itu, maka strategi pengembangan kawasan perlu dilakukan, yaitu pengembangan pertanian untuk

ketahanan pangan dan komoditas unggulan dengan pengembangan prasarana irigasi pada lahan pertanian dan pengembangan jalan akses ke lokasi produksi pertanian.

Dari sisi peningkatan infrastruktur permukiman kawasan, perlu dilakukan peningkatan jalan antar desa dan jalan lingkungan, pemenuhan sarana dan prasarana air minum, serta peningkatan rumah tidak layak huni.

Untuk dapat memaksimalkan proses penyusunan *masterplan* KPPN, serangkaian forum diskusi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dilakukan untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait. Informasi yang didapatkan dari forum diskusi tersebut menjadi bahan penyempurnaan penyusunan *masterplan* KPPN.

Pada akhirnya *masterplan* ini dapat menjadi acuan bagi unit organisasi atau unor di Kementerian PUPR dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan perdesaan. **(Shindie/Pilas/redaksi)**

Untuk dapat memaksimalkan proses penyusunan *masterplan* KPPN, serangkaian forum diskusi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dilakukan untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait.



Sumber: Dok.BPIW

# Produk BPIW Perlu Disosialisasikan Secara Reguler

**Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D**

Kepala BPIW Kementerian PUPR

Banyak produk yang telah dihasilkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, seperti *masterplan* atau rencana induk dan *development plan* atau rencana pengembangan. Produk yang dihasilkan tersebut perlu disosialisasikan secara reguler terutama kepada unit organisasi (unor) di

lingkungan Kementerian PUPR, sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Kepala BPIW, Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D yang telah dilantik 20 Juli lalu menyampaikan hal itu sangat dibincangi tim "Buletin Sinergi" beberapa waktu yang lalu. Berikut wawancaranya selengkapnya.

**Sebelum dilantik sebagai Kepala BPIW, Bapak sudah pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis di BPIW. Dari pengalaman tersebut, bagaimana pandangan Bapak terhadap kinerja BPIW selama ini?**

Sebenarnya posisi kita di BPIW paling depan dibandingkan dengan unor lain, karena kita membuat perencanaan dan program infrastruktur PUPR. Oleh karenanya seluruh pegawai BPIW harus punya wawasan luas dan dituntut untuk menguasai berbagai isu atau masalah. Kita harus lebih dulu tahu dan lebih dulu merencanakan.

Jadi prinsipnya, kalau BPIW sudah bagus dan berkualitas, maka unor-unor lebih mudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya, karena kita yang mengarahkan.

Misalnya, terkait infrastruktur jalan, kita mengarahkan dimana yang diprioritaskan untuk dibangun. Kemudian misalnya terkait daerah yang menjadi prioritas untuk dibangunnya instalasi air minum. Jadi kita di BPIW harus memiliki wawasan yang luas dan paling tahu dan memberikan 'payung' untuk semua unor.

**Adakah pekerjaan rumah yang akan Bapak fokuskan dalam kurun waktu enam bulan ke depan atau hingga Desember 2018?**

Secara umum, selama enam bulan ke depan

kita fokus menyelesaikan produk-produk unggulan. Namun ada beberapa penekanan di setiap pusat.

Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, merupakan salah satu unit kerja yang dipercaya memikirkan rencana strategis atau Renstra Kementerian PUPR kedepan.

Setiap tahun Renstra perlu dievaluasi atau *direview*, karena mungkin banyak yang berubah di lapangan atau dukungan pendanaannya belum memadai.

Terkait masalah keterbatasan dana. Pusat tersebut memikirkan ada terobosan pendanaan selain mengandalkan APBN. Sebenarnya pendanaan infrastruktur bisa melalui APBD, tapi juga bisa melalui kerja sama dengan swasta. Jadi Renstra juga harus menjaring pendanaan diluar APBN. Kalau itu bisa dilakukan, maka itu menjadi *champion* atau produk unggulan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.

Kemudian Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Pusat ini mendetailkan dari perencanaan ke pemrograman. Kalau sifatnya detail itu pemrograman untuk tahunan. Jadi *champion* di pusat ini adalah pemrograman, di mana setelah perencanaan dibuat, maka dibuat program untuk tahun pertama dan kedua. Program yang dibuat itu harus memuat masalah pendanaan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut.

"Jadi prinsipnya, kalau BPIW sudah bagus dan berkualitas, maka unor-unor lebih mudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya, karena kita yang mengarahkan. Misalnya, terkait infrastruktur jalan, kita mengarahkan dimana yang diprioritaskan untuk dibangun".

## Pembiayaan Infrastruktur



## KETERPADUAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

- 1 Membuat konsensus stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat).
- 2 Menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis.
- 3 Identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas.
- 4 Optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis.
- 5 Menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk Kawasan Pariwisata Strategis, mencakup 3A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi)



Jadi yang menarik adalah bagaimana kita mensinergikan semua pusat termasuk Sekretariat untuk bersama-sama bergerak untuk membina hubungan baik dengan semua unsur di lingkungan Kementerian PUPR dan juga diluar Kementerian PUPR seperti Kementerian Pariwisata, dan Perhubungan. Ini yang kita lakukan. Kita "jemput bola".

**Bagaimana dengan pusat lainnya yakni Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan?. Apa catatan penting Bapak terkait fokus program yang mereka lakukan hingga akhir tahun nanti?**

Untuk Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, kegiatannya harus difokuskan pada dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pusat Pengembangan Kawasan Strategis harus bisa mengawal itu. Program yang kita lakukan dapat menjadi *guidance*, tidak hanya untuk Kementerian PUPR tapi termasuk juga Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Hal itu terjadi ketika BPIW dipercaya untuk menyusun *Integrated*

*Tourism Masterplan* (ITMP) di tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok.

Lewat program yang kita buat, maka kita berupaya untuk menghidupkan pembangunan infrastruktur di KEK, meskipun dukungan Kementerian PUPR diluar areal KEK. Kita mendukung kawasan strategis maupun masyarakat disekitarnya. Perencanaan yang

*"Lewat program yang kita buat, maka kita berupaya untuk menghidupkan pembangunan infrastruktu di KEK, meskipun dukungan Kementerian PUPR diluar areal KEK."*

kita buat lebih banyak untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, maka catatan pentingnya adalah bahwa pengembangan yang dilakukan tidak hanya perkotaan, tapi juga perdesaan. Jadi jangan memberi dukungan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan perkotaan saja, tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan perdesaan.

Program pembangunan yang dibuat harus tetap menjaga kelestarian lingkungan perdesaan. Kemudian ketika kita membuat program menyangkut hunian, maka harus disesuaikan dengan kondisi perdesaan, di mana hunian yang dibuat lebih sederhana dan harganya lebih murah. Kita juga harus mengedepankan program yang menunjang agropolitan. Hal ini mengingat perdesaan merupakan pilar, karena produk hasil pertanian dan perkebunan yang dimanfaatkan masyarakat perkotaan, berasal dari perdesaan. Bila program dukungan infrastruktur itu direalisasikan secara konsisten, maka akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*.

**Untuk mengoptimalkan peran BPIW ke depan, kebijakan seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam masa kepemimpinan Bapak?**

Untuk mengoptimalkan peran BPIW, kita akan menerapkan kebijakan yang memperkuat koordinasi lintas Pusat termasuk Sekretariat, lintas Bidang dalam satu Pusat, serta lintas Bidang antar Pusat. Koordinasi yang diperkuat ini terkait produk perencanaan dan pemrograman dengan tetap memperhatikan *business process* BPIW.

Diharapkan, setiap Pusat lebih mengutamakan kolaborasi. Untuk mengawalinya, kita akan bentuk *task force* atau kelompok kerja (Pokja) jangka pendek hingga akhir tahun 2018 dan jangka menengah hingga akhir tahun 2019. Selanjutnya kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) BPIW sesuai bidang dan kompetensi yang dibutuhkan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan.

Nantinya kita melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal di beberapa unsur untuk mengklarifikasi terkait sejauh apa BPIW menangani perencanaan dan kalau unsur juga melakukan perencanaan di sektornya, seperti apa perencanaan infrastruktur yang dibuat itu. Jadi pada level mana

pembagian perencanaan yang dibuat, sehingga jangan terjadi duplikasi atau bahkan *blank spot*.

Maksud *blank spot* itu seperti ini, ketika kita dan unsur-unsur sudah bagus membuat perencanaan, tapi realisasi di lapangannya tidak ketemu perencanaannya. Namun Ditjen Cipta Karya sudah sepakat bahwa BPIW berada didepan dalam hal perencanaan infrastruktur PUPR. Kepada unsur-unsur nanti saya akan sampaikan bahwa kita akan mengeluarkan perencanaan terkait arahan lokasi maupun arahan sektor.

Misalnya terkait KSPN Danau Toba di Sumatera Utara. Kementerian PUPR melakukan keterpaduan pembangunan infrastruktur di delapan kabupaten yang ada sekitar danau tersebut, di mana Ditjen Cipta Karya membangun instalasi air minum dan sanitasi, kemudian Ditjen Bina Marga membangun jalan dari Medan ke Prapat. Selanjutnya Ditjen Penyediaan Perumahan masuk dengan unit perumahannya dan Ditjen Sumber Daya Air dengan air bakunya. Jadi kita harus bekerja sama dengan empat sektor itu.

Dengan demikian satu kesatuan kawasan akan tertangani, di mana keterpaduan dijalankan dengan baik. BPIW berperan untuk memberikan arahan lokasi dan arahan sektor yang akan membangun infrastruktur di kawasan tersebut.

**Produk seperti apa yang mendesak dan strategis untuk dihasilkan BPIW ke depannya? Mengapa demikian?**

BPIW dipercaya menangani ITMP untuk tiga KSPN yakni Danau Toba, Lombok (Mandalika), dan Borobudur, di mana kita menterpadukan seluruh sektor di Kementerian PUPR dan juga bersinergi dengan kementerian lain. Penyusunan ITMP dilakukan satu tahun kedepan dengan mendapatkan



Sumber: Dok. BPIW

bantuan Bank Dunia. Itu menjadi mendesak dan strategis untuk kita lakukan dengan optimal.

Tahun depan, Kementerian PUPR dipercaya untuk membangun pasar dan sekolah. Dengan demikian koordinasi dan sinergi kita bertambah dengan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Apa pesan khusus Bapak Menteri PUPR kepada Bapak yang perlu direalisasikan dan bagaimana cara Bapak merealisasikannya?**

Pesan khusus Bapak Menteri yaitu agar mengutamakan kehati-hatian dalam bekerja dan tertib administrasi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam kegiatan lelang, kontrak, pelaksanaan, dan pengawasan.

Bapak Menteri juga berpesan untuk menjaga profesionalisme, bekerja efisien, dan bekerja lebih keras untuk mencapai target pembangunan nasional hingga akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan amanat Bapak

Menteri, maka BPIW perlu memperkuat kerja sama atau *team work*, koordinasi lintas Pusat termasuk Sekretariat, dan terus menjalin kebersamaan.

**Apa tantangan yang dihadapi BPIW ke depan dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut?**

Tantangan utama yang dihadapi BPIW yaitu keterbatasan SDM dan pendanaan. Untuk itu, akan dipilih prioritas yang sangat penting dan mendesak terkait lokasi KSPN, KI, KEK, dan Kota Baru. Kemudian kita akan menyelesaikan tugas dan fungsi yang masih belum dilaksanakan secara bertahap, menentukan prioritas, dan memperkuat koordinasi lintas Pusat dan Sekretariat.

Keterbatasan dana kita sikapi dengan bekerja secara efisien

*"Tantangan utama yang dihadapi BPIW yaitu keterbatasan SDM dan pendanaan. Untuk itu, akan dipilih prioritas yang sangat penting dan mendesak terkait lokasi KSPN, KI, KEK, dan Kota Baru. Kemudian kita akan menyelesaikan tugas dan fungsi yang masih belum dilaksanakan secara bertahap"*

dan meminimalkan hal-hal yang kurang produktif. BPIW juga perlu menyiasati pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah agar lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, kita harus memiliki rincian jadwal rencana pelaksanaan FGD dari setiap Pusat dan menggabungkan FGD-FGD di kota yang sama.

Kepercayaan yang diberikan Pemerintah kepada kita juga menjadi tantangan. Untuk itu SDM kita juga harus mampu bekerja sambil belajar atau *learning by doing* agar dapat menguasai berbagai masalah dengan cepat. SDM kita sebagian besar masih muda-muda. Ini berarti dari segi pengalaman dan jam terbang juga masih terbatas. Sehingga perlu kita optimalkan dan diarahkan dengan baik.

**Dalam hal apa saja *learning by doing* tersebut?**

Misanya dalam hal membuat perencanaan, seperti apa membuat perencanaan yang berkualitas, sehingga perencanaan yang dibuat itu dapat dipergunakan orang lain. Harus dipelajari perencanaan itu harus memenuhi kriteria apa saja.

Contoh lain dalam hal masalah dukungan pendanaan, harus dilihat

secara realistis dan bila ada hambatan pendanaan, dicari jalan penyelesaian hambatan tersebut. Dengan kata lain unit kerja yang ditunjuk untuk mencari solusi dari hambatan itu harus mampu melaksanakannya. Kedepan akan seperti itu pola kerjanya.

**Saat pelantikan pejabat Eselon I hingga III pada 21 Juli 2018, Pak Menteri menyatakan bahwa ada tugas tambahan terbaru bagi Kementerian PUPR dari Presiden,**

*“Kepercayaan yang diberikan Pemerintah kepada kita juga menjadi tantangan. Untuk itu SDM kita juga harus mampu bekerja sambil belajar atau *learning by doing* agar dapat menguasai berbagai masalah dengan cepat”*

**yakni membangun pasar-pasar dan sekolah-sekolah. Bagaimana BPIW merespon tugas baru tersebut dalam perencanaan yang dibuat?**

Kementerian PUPR sudah berpengalaman dalam membangun sekolah. Melalui Satker SMP Ditjen Cipta Karya. Kala itu Kementerian PU telah membangun berbagai SMP. Namun membangun pasar, menjadi tugas baru bagi Kementerian PUPR. Untuk itu, BPIW akan merespon tugas

tersebut dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah.

Di samping itu, kita juga akan melengkapi dokumen perencanaan yakni *Masterplan* dan *Development Plan* dengan rencana pembangunan sekolah dan pasar. Aspek perencanaan BPIW menjadi semakin luas dengan satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu percepatan pemenuhan *readiness criteria*, khususnya *Detail Engineering Design* (DED). Untuk itu, kedepan BPIW harus bekerja ekstra cepat dalam waktu yang relatif lebih singkat.

**Apa harapan Bapak khususnya terhadap kinerja pusat-pusat dan keseluruhan insan BPIW?**

Produk-produk BPIW diharapkan dapat disosialisasikan kepada instansi di lingkup internal Kementerian PUPR dan juga eksternal Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah. BPIW perlu memperluas relasi dengan *stakeholder* di eksternal Kementerian PUPR. Salah satu caranya yaitu menyelenggarakan momen khusus dengan instansi lain untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah.



Sumber: Dok. BPIW



Sumber: Dok. BPIW

Saya telah mengawalinya dengan melakukan *roadshow* ke unor di lingkungan Kementerian PUPR. Bersama jajaran pimpinan BPIW lainnya, saya melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga dan Cipta Karya. Nanti kita akan teruskan melakukan pertemuan ke Dirjen lainnya. Kita akan membentuk tim untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, sehingga keterpaduan infrastruktur dapat terjaga dengan baik.

**Bagaimana Bapak menyiapkan SDM?**

Kita akan melakukan penataan SDM yang ada, di mana para ahli yang ada dilihat dari kebutuhan dan jumlahnya yang ada di pusat-pusat. Misalnya ahli ekonomi yang ada di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, dapat dikonsentrasikan di Pusat Pengembangan Perkotaan yang membutuhkan ahli tersebut. Demikian pula misalnya ahli hukum, dibutuhkan di bidang hukum. Dengan demikian profesionalisme kerja SDM yang ada bisa lebih optimal.

SDM yang ada dapat melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan pihak lain, seperti misalnya kita melakukan kajian mengenai dampak dioperasikannya tol Trans Jawa. Kajian yang kita lakukan dapat menjadi rekomendasi atau masukan yang dapat lebih menyempurnakan peraturan yang ada.

**Bagaimana pula harapan bapak terhadap unor di lingkungan kementerian PUPR dan kementerian/lembaga lain yang menjadi stakeholder BPIW?**

Kami berharap kerja sama antara BPIW dengan unor yang ada dapat berlangsung lebih baik. Unor diharapkan mendukung perencanaan BPIW, dengan kata lain, pelaksanaan atau implementasi pembangunan di

*“Untuk mensosialisasikan produk-produk BPIW kita akan membuat forum reguler. Artinya produk yang kita hasilkan setiap bulan dapat disosialisasikan kepada para unor sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sudah mulai kita lakukan”*

lapangan sesuai dengan perencanaan BPIW.

Sebagai contoh di KSPN Danau Toba, BPIW merencanakan pengembangan infrastruktur di delapan kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Unor-unor turut memprioritaskan pengembangan infrastruktur di delapan kabupaten tersebut secara berkelanjutan.

BPIW seharusnya memberikan arahan apakah lokasi benar atau tidak. Sebagai contoh membangun sekolah di lokasi persawahan produktif, kita memberi

informasi bahwa membangun sekolah jangan diareal tertentu. Jadi kita memberi arahan lokasi.

**Apa kiat Bapak untuk meyakinkan stakeholder bahwa produk perencanaan yang sudah dibuat BPIW dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai *guidance*?**

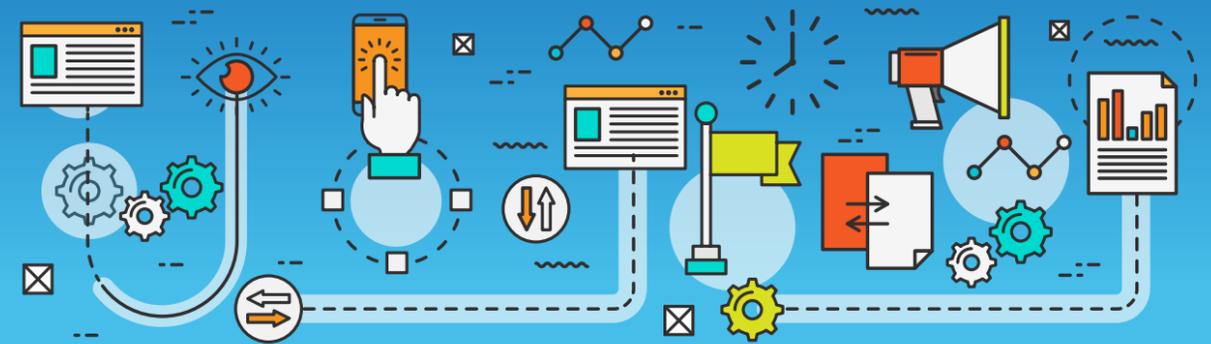
Saya menilai produk-produk BPIW belum tersosialisasi secara maksimal kepada unor-unor terutama di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk mensosialisasikan produk-produk BPIW kita akan membuat forum reguler. Artinya produk yang kita hasilkan setiap bulan dapat disosialisasikan kepada para unor sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Hal ini sudah mulai kita lakukan. Itu kiat yang pertama. Kiat kedua, produk yang dihasilkan harus terus di *update*, sehingga kualitas produknya tetap terjaga. Kemudian kiat ketiga adalah kita harus pandai-pandai membawa diri. Sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Jadi intinya kita harus terus mensosialisasikan produk-produk yang telah dihasilkan BPIW. **(Hendra/Tim Redaksi)**

# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini dua potongan pemberitaan terpilih pada bulan Juli.

Kliping berita BPIW dapat di download di: [bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook](http://bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook)



## KSPN Tanjung Lesung Siap Dikembangkan

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung di Banten.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan, KSPN Tanjung Lesung merupakan salah satu KSPN prioritas untuk dikembangkan pemerintah.

Pengembangan KSPN Tanjung Lesung akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik terhadap KSPN tersebut.

"Terlebih, KSPN Tanjung Lesung pada tahun 2019 ditargetkan mendapat kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara dan 5 juta wisatawan nusantara," ujarnya Kamis (5/7).

Dengan begitu, lanjutnya, KSPN Tanjung Lesung perlu mendapat sentuhan infrastruktur PUPR, baik di kawasan menuju destinasi wisata maupun di kawasan dalam destinasi wisatanya sendiri.

Untuk infrastruktur permukiman, ungkap Hadi, akan ada penyediaan perumahan, antara lain seperti program pembangunan rumah khusus untuk nelayan, termasuk rumah khusus untuk pondok pesantren dan lainnya.

Selain itu, juga terdapat program pembangunan kawasan pariwisata Tanjung Lesung, penataan kawasan destinasi wisata Tanjung Lesung, pembangunan Sistem Pengadaan Air

Minum (SPAM) kawasan Tanjung Lesung.

"Ada juga penanganan sanitasi KSPN Tanjung Lesung, penataan Kawasan Wisata Tanjung Lesung—Desa Cikadu, pengembangan desa wisata dan program lainnya," ujarnya.

Hadi mengatakan, terkait dengan pengelolaan sumber daya air antara lain, ada program pengaman pantai ruas Panimbang—Tanjung Lesung, pengamanan Pantai Jongor, Kemuning, dan Caringin.

Selanjutnya penanganan yang akan dilakukan Kementerian PUPR antara lain, pembangunan jalan.

Untuk jalan terbagi menjadi preservasi Jalan Citeureup—Tanjung Lesung, preservasi Jalan Pasauran—Labuhan—Cibaliung, serta pelebaran jalan menuju Pasauran—Cibaliung dan Citeureup—Tanjung Lesung.

Adapula rekonstruksi Jalan Sumur—Cibaliung—Muara Binuangeun serta program-program lainnya.

Sebelumnya pemerintah menilai baru Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat paling pesat pengembangannya dalam menarik investasi asing dibandingkan dengan KEK lainnya di bidang pariwisata yakni Tanjung Lesung di Banten dan Morotai di Maluku Utara.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoch Suharto Pranoto mengatakan, 6 bulan sejak dideklarasikan bisa beroperasi oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun lalu, kawasan ini banyak mengantongi komitmen investasi asing. (Anitana W.Puspita)

Ulasan Teropong Media di edisi kali terkait berita di Bisnis Indonesia pada 7 Juli 2018, yang diberi judul "KSPN Tanjung Lesung Siap Dikembangkan".

Berikut ulasannya :

### Dukungan Infrastruktur Sektor PUPR Terhadap KSPN Tanjung Lesung

Pada berita itu disebutkan bahwa Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung Provinsi Banten merupakan salah satu KSPN prioritas untuk dikembangkan pemerintah. Pengembangan KSPN Tanjung Lesung akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik terhadap KSPN tersebut.

Pemerintah menargetkan KSPN Tanjung Lesung dapat mencapai satu juta wisatawan mancanegara (wisman) dan lima juta wisatawan nusantara (wisnus) pada 2019 mendatang.

Dari sisi akses, strategi penanganan sektor PUPR pada KSPN tersebut yakni meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan dengan pelebaran jalan menuju standar Pasauran, Cibaliung dan Citeureup, Tanjung Lesung, serta meningkatkan akses menuju Kecamatan Sumur. Strategi penanganan lainnya yakni dari sisi amenities, di mana Peningkatan penyediaan air minum di Kawasan Pariwisata.

Tanjung Lesung merupakan bagian dari 10+2 KSPN yang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah. Selain Tanjung Lesung, juga ada Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-

Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika/Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Kemudian ditambah Toraja (Sulawesi Selatan) dan Mandeh (Sumatera Barat).

Dalam memberikan dukungan infrastruktur terhadap KSPN, Kementerian PUPR melakukannya berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), termasuk di KSPN Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur sektor PUPR difokuskan pada 35 WPS yang terdiri dari 97 Kawasan Strategis untuk meningkatkan daya saing antar daerah dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Namun kini pemerintah memfokuskan pada tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika/Lombok. Pengembangan pariwisata di tiga kawasan tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia. Saat ini BPIW tengah mengawal penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) di tiga kawasan tersebut. Meski demikian, BPIW tetap memprogramkan dukungan Kementerian PUPR terhadap KSPN lainnya. Dengan dukungan infrastruktur sektor PUPR diharapkan target kunjungan wisman yang mencapai 20 juta orang pada 2019 dapat tercapai. (Hendra Djamal)



# Ketimpangan Jadi Tantangan

Pemerintah mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru selain di Jawa hingga 2045. Cara itu diharapkan bisa menekan ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa dan wilayah barat masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ketimpangan antarwilayah ini diperlukan terobosan dan inovasi kebijakan di tingkat daerah.

"Ketimpangan bukan masalah baru. Dalam paltan sejarah, permasalahan itu pernah memicu pemberontakan di beberapa daerah Indonesia," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Kalla mengatakan, ketimpangan ekonomi di wilayah timur Indonesia bisa memicu konflik sosial dan politik. Oleh karena itu, pemerintah giat membangun dan mengembangkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Perekonomian daerah dipicu berdasarkan kebhinekaan dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tak hanya mengandalkan pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan. Otonomi daerah justru memperluas wewenang pemerintah daerah untuk mengurai masalah itu. Dalam upaya mengatasi ketimpangan, kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi, mulai dari air, sanitasi, listrik, hingga fasilitas kesehatan. Kevitalitas pemimpin diperlukan untuk menarik investasi daerah dan mengoptimalkan perekonomian nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Nilainya sekitar 80 persen produk domestik bruto (PDB). Jawa dan Sumatera selalu mendominasi pembentukan PDB yang masing-masing berperan 58 persen dan 22 persen.

"Target pemerintah tahun 2045 belum bisa ideal. Dominasi Jawa diperkirakan hanya turun 5 persen menjadi 53 persen PDB. Sementara 5 persen dalam 25 tahun itu bukan hal mudah dan tak ada jaminan itu bisa dilakukan," kata Bambang.

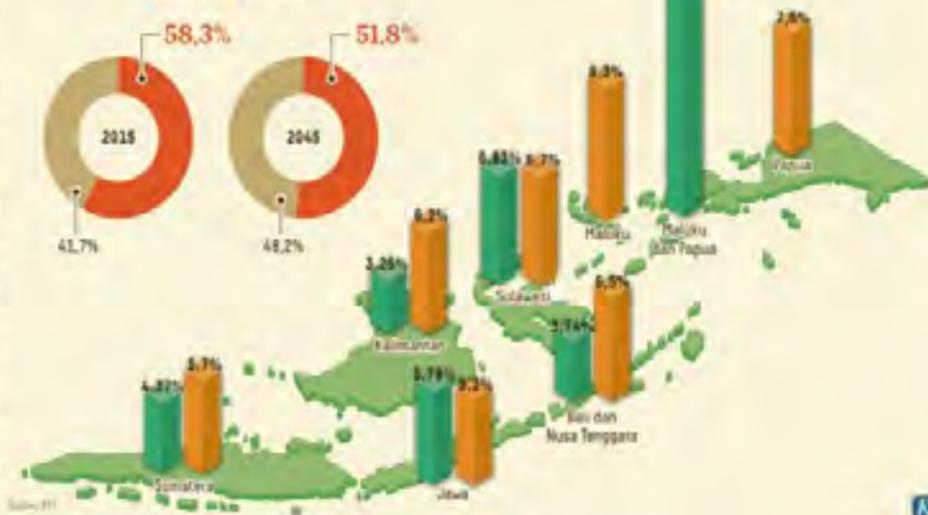
Indikator ketimpangan wilayah Indonesia barat dan timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2016, rata-rata IPM wilayah barat adalah 71,9. Adapun di Indonesia bagian timur 67,36. Adapun produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita pada 2016 di wilayah barat Rp 42,43 juta dan

## Laju Pertumbuhan PDRB Per Pulau

PDRB: Produk domestik regional bruto

Peta dan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional

■ Jawa ■ Lain-lain



di wilayah timur Rp 26,45 juta. (Kompas, 20/4/2018).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menaruh perhatian pada ketimpangan pembangunan bukan hanya dari aspek infrastruktur, melainkan juga akses internet. Lanskap negara kapulauan memerlukan pemangku kabel optik karena harus melintasi perairan jarak jauh. Selain itu, operator belum tertarik mengembangkan internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal karena pasar yang kecil.

"Internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal baik di wilayah barat atau timur Indonesia, akan tetap dikembangkan secara bertahap," kata Rudi.

### Pusat ekonomi baru

Dalam kesempatan itu Bambang menambahkan, pemerintah fokus mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru selain Jawa, hingga 2045. Pusat ekonomi baru tersebut bukan berbasis sektor pertambangan atau sumber daya alam yang bersifat sementara. Daerah di luar Jawa akan dikembangkan untuk industri pengolahan, seperti tekstil, otomotif, dan industri berbasis sumber daya alam.

Arah pengembangan daerah yang dirincikan Bappenas mencakup enam wilayah. Papua akan dikembangkan untuk basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis SDA; Sulawesi untuk industri pangan dan gerbang kawasan Asia serta



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (kanan) bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quentin memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Selasa (10/7/2018). IDF merupakan platform dialog nasional mengenai pembangunan.

dan gerbang kawasan Asia serta Jawa untuk peralihan dari jasa.

"Kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi bisa ikut terbangun. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen bisa tercapai dengan syarat kontribusi tidak hanya dari Jawa," kata Bambang.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, kontribusi swasta merupakan pembangunan daerah sangat penting. Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jatim bekerja sama dengan swasta membangun Sistem Penyediaan Air Minum Umbulmaji 1,3 juta warga. (KNN)

Ulusan Teropong berikut terkait berita di Kompas pada 11 Juli 2018, yang diberi judul "Ketimpangan Jadi Tantangan".

Berikut ulasannya :

## Mengatasi Ketimpangan, Pembangunan Infrastruktur diluar Jawa dan Sumatera Terus Dipacu

Dalam berita itu disampaikan mengenai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi di wilayah timur Indonesia bisa memicu konflik sosial dan politik. Oleh karena itu pemerintah giat membangun dan mengembangkan daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Nilainya sekitar 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa dan Sumatera selalu mendominasi pembentukan PDB, yang masing-masing berperan 58 persen dan 22 persen.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut maka pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa dan Sumatera atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dipacu. Bila jarak disparitas itu jauh, maka semestinya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yakni Pulau Jawa dan Sumatera dinaikkan secara pelan dan pembangunan Kawasan Timur Indonesia KTI dinaikkan dengan cepat.

Pembangunan infrastruktur PUPR untuk KTI banyak dilakukan, antara lain dengan rencana lanjutan menyambung jalan lintas dan dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.

Pembangunan di Kawasan Strategis seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, KSPN Morotai, KSPN Raja Ampat, dan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, juga menjadi prioritas pengembangan infrastruktur di KTI. Selain itu, Kawasan Perbatasan Indonesia-Laut

China Selatan, Kawasan Wisata Bahari Desa Olele, dan Kawasan Food Estate Merauke.

Percepatan pembangunan infrastruktur di KTI juga diiringi dengan pengembangan wilayah, dimana di Indonesia terbagi dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Hal ini sejalan dengan pesan-pesan Nawa Cita dan esensi dari konsep WPS, yaitu pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.



Jembatan Petuk, Kupang, NTT.

Pengembangan infrastruktur pada kawasan-kawasan pertumbuhan tersebut, diarahkan untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya, sehingga dalam kerangka WPS, akan didapatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Hendra Djamal)

# Ditargetkan 2 Juta Wisman, PUPR Tangani Infrastruktur di KSPN Borobudur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya.

“Dukungan infrastruktur PUPR dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di KSPN Borobudur,” papar Kepala

**Dukungan infrastruktur PUPR dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di KSPN Borobudur.**

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa hari lalu.

Ia memaparkan, pada tahun 2019 KSPN tersebut ditargetkan mendapat kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara dan 5 juta wisatawan domestik. “Pada tahun 2016 lalu, KSPN Borobudur dikunjungi 511 ribu wisatawan mancanegara dan 2,4 juta wisatawan domestik,” ungkapnya.

Guna mendukung capaian sasaran 2019 dilakukan penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan.

“Untuk penanganan konektivitas, diantaranya ada rehabilitasi Jalan Tanjung Japuan-Mendut, preservasi pelebaran jalan menuju Standar Pringsurat-Secang-Bts. Yogya, termasuk pemeliharaan rutin Jalan Keprekan-Borobudur,” terang Hadi.

Selain itu, ia menambahkan, pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati, pembangunan Jembatan Gantung Nawacita, pembangunan Jembatan Kretek 2, pelebaran Jalan Sindutan-Congot dan Jalan Demen-Glagah.

“Ada juga pelebaran Jalan Sentolo-Dekso, pembangunan *Underpass* Kentungan dan banyak lagi program lainnya,” ujar Hadi.

Terkait pengembangan infrastruktur permukiman, Hadi menjelaskan, ada penataan Kawasan Wisata Candi Mendut dan penataan Kawasan Candi Pawon, serta pembangunan drainase mendukung KSPN Borobudur. Hadi melanjutkan, ada juga



Destinasi Candi Borobudur

Sumber: Dok. BPIW

peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan Perkotaan Kawasan Gajahwong dan Kawasan Code (Sorosutan), optimalisasi Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Dlingo, peningkatan infrastruktur air limbah terpusat Sewon, pengembangan permukiman perdesaan Kabupaten Magelang, optimalisasi SPAM di Kawasan Sermo, serta pembangunan TPS3R di Kabupaten Magelang.

“Ada juga optimalisasi SPAM di Kawasan Kalibawang, pengembangan SPAM Panjatan, peningkatan kinerja TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah, red) Banyuroto dan banyak program lainnya,” ungkap Hadi.

Untuk pengelolaan sumber daya air, Hadi mengatakan, ada pembangunan jaringan air baku Kawasan Perekonomian Terpadu Kabupaten

Kulon Progo, Pembangunan Embung Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Gajah Wong, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Winongo Kecil, pembangunan Bendung Kamijoro.

**Sejumlah pemerintah daerah di sekitar kawasan KSPN Borobudur dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah di daerah dapat menyiapkan diri**

“Termasuk ada rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Progomanggis Kabupaten Magelang, pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan program lainnya,” kata Hadi. Adapun untuk penyediaan perumahan ada pembangunan rumah susun Pondok

Pesantren ICBB, serta pembangunan rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pembangunan Rumah Susun Sewa Kabupaten Magelang.

“Ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Syantikara dan lainnya,” ujarnya.

Ia berharap, sejumlah pemerintah daerah di sekitar kawasan KSPN Borobudur dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah di daerah dapat menyiapkan diri dan melakukan langkah-langkah untuk bersinergi demi terciptanya percepatan dalam pengembangan KSPN tersebut. **(ris/mond/infoBPIW)**

# Keterpaduan untuk Mendukung KEK Mandalika Terus Ditingkatkan

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Suahyono menyatakan keterpaduan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok sudah terjalin dengan baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.

Untuk itu, Hadi mengajak semua pihak, yakni unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR dan juga kementerian/ lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BUMN, dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, untuk terus meningkatkan keterpaduan.

Demikian disampaikan saat berkunjung ke ITDC dan melakukan peninjauan ke KEK Mandalika bersama Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan, Kamis (5/7).

Lebih lanjut Hadi menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah menyiapkan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) untuk

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika. Kawasan tersebut mendapat dukungan dari Bank Dunia. Selain Mandalika, Bank Dunia juga memberi bantuan untuk pengembangan KSPN Borobudur (Jawa Tengah) dan Danau Toba (Sumatera Utara).

Keterpaduan semua pihak dalam

**Tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan dan bagi para pekerja.**

mendukung pengembangan pariwisata, terutama di tiga KSPN tersebut akan diramu dalam ITMP dalam mewujudkan pembangunan dengan basis perencanaan yang terpadu.

Bentuk dari keterpaduan misalnya ketika Kementerian Perhubungan membangun dermaga kapal, maka Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Daerah membangun pusat kerajinan dan atraksi budaya serta penyiapan Sumber Daya Manusia

(SDM) sektor pariwisata. Sedangkan Kementerian PUPR menurut Hadi membangun infrastruktur pendukung termasuk hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bermukim di sekitar lokasi KEK dan permukiman nelayan. Program lain yang disiapkan seperti jalan akses, drainase, pembangunan Tempat Pembuangan (TPA) Sampah, dan air bersih utk masyarakat.

Sehubungan dengan pengembangan KEK Mandalika, Hadi menyatakan tugas BPIW adalah membuat program yang berdampak positif bagi MBR, seperti perumahan untuk nelayan maupun bagi para pekerja di beberapa proyek pembangunan di kawasan wisata tersebut. Untuk penataan permukiman nelayan dapat menjadi daya tarik wisata khas daerah.

"Kementerian PUPR dapat mendukung melalui program rumah susun atau rusun untuk pekerja. Namun perlu ketersediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan ITDC. Saat ini yang paling penting itu pembangunan atau revitalisasi kampung nelayan, itu tugas kita,"



Tinjauan ke lapangan KEK Mandalika

Sumber: Dok BPIW

tegas Hadi. Selain itu yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR adalah perbaikan drainase maupun revitalisasi kali di kawasan tersebut.

Menurut Hadi, masukan-masukan dari pihak ITDC akan ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan dengan beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuannya agar masukan-masukan berupa revitalisasi kampung nelayan dan normalisasi sungai, dapat dimasukkan dalam program infrastruktur Kementerian PUPR melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang akan datang.

Sebelum melakukan tinjauan ke lapangan, Hadi dan stafnya melakukan kunjungan ke kantor ITDC dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai seberapa jauh progres yang telah dicapai BUMN tersebut, masalah yang dihadapi, dan

harapannya terkait koordinasi dengan Kementerian PUPR.

"Seperti masalah sampah. ITDC mengelola sampah sampai TPS atau Tempat Pembuangan Sementara. Sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir atau TPA bisa didukung Kementerian PUPR

**Masukan-masukan dari pihak ITDC akan ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan dengan beberapa unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.**

bersama Pemerintah Daerah yang perlu menyediakan lahannya," ungkap Hadi.

Direktur ITDC, A.A. Ngurah Wirawan menyatakan instansinya perlu melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk

Kementerian PUPR. Sehingga pengembangan KEK Mandalika lebih optimal. Ngurah mengaku bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terkadang berbenturan dengan yang dilakukan instansi lain.

Untuk itu, ia menyatakan dalam waktu dekat ITDC berencana melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk membicarakan hal-hal teknis terkait pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. **(Hen/ris/infobpiw)**

# BPIW Gelar Pelatihan *Personal Branding*

Seluruh jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu terus mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan berbagai pihak terkait.

Dengan begitu produk BPIW bisa menjadi acuan bagi semua Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dalam pengembangan infrastruktur agar lebih terpadu.

“Saat ini, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,-rd) sudah mengadopsi perencanaan dan *Masterplan - Development Plan* (MPDP) yang dihasilkan BPIW untuk perencanaan K/L terkait. Hal ini menunjukkan bahwa BPIW sudah mulai menunjukkan *branding*-nya walau belum sepenuhnya optimal,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat membuka acara “*Personal Branding* dalam Meningkatkan Sinergi dan Etos Kerja Organisasi” beberapa waktu lalu di Bogor.

Acara tersebut diikuti jajaran pejabat struktural mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hingga Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW.

Lebih lanjut, Lana menerangkan, hal menarik dari acara tersebut mengenai komunikasi. “Saya pikir, komunikasi yang harus ditingkatkan. Siapa *stakeholdernya* BPIW dan siapa yang menggunakan produk BPIW, itu yang



Suasana acara “*Personal Branding* dalam Meningkatkan Sinergi dan Etos Kerja Organisasi”. Sumber: Dok BPIW

perlu kita identifikasi karena akan terkait bentuk komunikasi yang akan kita sampaikan,” terang Lana.

Lana berharap, kegiatan untuk peningkatan kemampuan berkomunikasi tersebut akan mendukung etos kerja yang lebih baik dan memperkuat organisasi. Sebab, hal yang dilakukan pada intern organisasi akan terefleksi keluar. “Meskipun kegiatan hanya satu hari, kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan

untuk memperbaiki apa yang kita lakukan, kemudian meningkatkan etos kerja dan kinerja BPIW” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, BPIW perlu menyiapkan kemampuan jajarannya untuk berbagai kondisi tantangan.

“Tuntutan kepada BPIW itu besar dan sangat tinggi sekali. Hal tersebut membuat BPIW membuka diri untuk mengekspresikan pemikiran tanpa ragu-ragu,” tegas Firman.

jas Firman. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini, Erwin Parengkuan, Fasilitator dari Talk Inc. ini menjelaskan, hal yang terpenting dalam mencapai cita-cita adalah keberanian.

Orang yang percaya diri adalah orang yang mengetahui kekuatan dirinya, mengetahui yang perlu ditingkatkan dan punya sikap yang baik. “Disitulah seseorang mempunyai *personal branding* yang kuat,” jelasnya.

Erwin mengungkapkan ada tiga langkah untuk membentuk *personal*

membuat orang percaya dan tertarik.

“Meskipun anda pintar atau memiliki kata-kata yang bagus, tanpa *gesture*

“Kita adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang sangat spesifik. Kita bisa saling dorong untuk menghasilkan gagasan besar yang bukan hanya untuk Kementerian PUPR tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,” jelas Firman.

dan artikulasi yang baik untuk penyampaian kata-kata, komunikasi anda tidak akan menarik bagi lawan bicara,” jelas Erwin. (bri/InfoBPIW)

Tuntutan yang besar, lanjut Firman, harus menjadikan sasaran besar yang dibangun masing-masing unit dan perlu terjalin kerja sama yang baik untuk mencapai sasaran tersebut.

“Kita adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang sangat spesifik. Kita bisa saling dorong untuk menghasilkan gagasan besar yang bukan hanya untuk Kementerian PUPR tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,”

*branding*. “Pertama analisa siapa dirimu. Kedua, buatlah *brand*-mu, ekosistemmu dan jaringanmu. Adapun ketiga buatlah konten orisinil, terlibat, berbagi, dengarkan dan perhatikan,” ungkapnya.

la juga menjelaskan, terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi yaitu *words*, *voice* dan *visual*. Hal yang sangat berperan adalah *visual* yang terbagi ke dalam *body language* dan total *look*. Bahasa tubuh yang meyakinkan



# Hadi Sucahyono Pimpin BPIW Kementerian PUPR

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono saat dilantik Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di ruang Auditorium Kementerian PUPR.

Sumber: Dok. BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memiliki pemimpin baru. Kepala BPIW Kementerian PUPR saat ini dijabat oleh Hadi Sucahyono menggantikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti. Hadi Sucahyono sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala BPIW tersebut dilakukan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat pagi (20/7).

Pada kesempatan yang sama, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan BPIW Kementerian PUPR, yakni Kepala

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Riska Rahmadia, Kepala Bidang Penyusunan Program, Mangapul L. Nababan.

Termasuk Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Sosilawati,

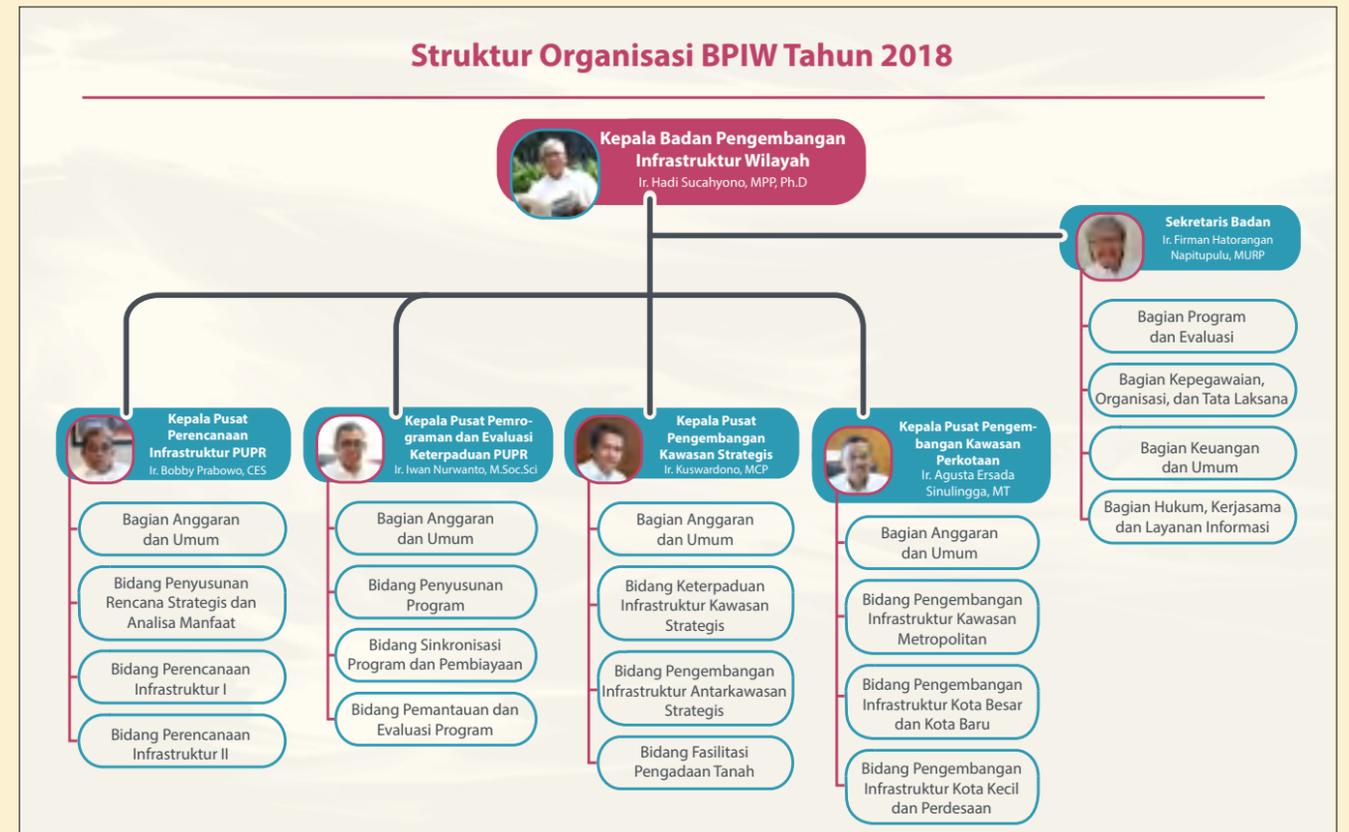
**“Saya sedih, harus berpisah dengan tim yang selama ini telah terbina solid dan kerja keras,” ungkap Menteri PUPR sambil terisak.**

Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Maulidya Indah Junica, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Bernadi Haryawan.

Kemudian Kepala Bagian Anggaran dan Umum Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, M Rudy Siahaan serta Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Melva Eryani.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR menyatakan, saat ini 50 persen lebih jajaran eselon I Kementerian PUPR mengalami perubahan. “Saya sedih, harus berpisah dengan tim yang selama ini telah terbina solid dan kerja keras,” ungkap Menteri PUPR sambil terisak.

Menteri PUPR juga menyampaikan, terima kasih atas dedikasi para pejabat eselon I yang purna tugas, sehingga Kementerian PUPR senantiasa terus mendapat kepercayaan dan



tugas baru dari pemerintah. “Tugas tambahan terbaru yang masuk adalah pembangunan pasar-pasar dan sekolah-sekolah,” terangnya.

Ia berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat segera melanjutkan kinerja dari pimpinan sebelumnya. Kemudian, dapat bekerja lebih baik, lebih tertib dan juga lebih cepat.

Dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan juga penandatanganan dan pernyataan pakta integritasi, yakni para pejabat yang baru dilantik berjanji untuk tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Usai pelantikan tersebut, Hadi Sucahyono melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat di lingkungan BPIW. Dalam rapat

tersebut, Hadi mengingatkan jajaran BPIW untuk bekerja lebih hati-hati, selain tetap kerja keras serta profesional.

Ia menyampaikan, BPIW sangat diharapkan dapat menggiring seluruh unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur PUPR. “Arahan dari

**BPIW sangat diharapkan dapat menggiring seluruh unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastruktur PUPR.**

BPIW kini sudah ditunggu, seperti untuk penentuan lokasi, sektor apa melakukan apa. Artinya, BPIW harus punya arahan untuk seluruh Unor,” jelas Hadi.

Dengan begitu, lanjutnya, BPIW perlu “menjahit” perencanaan yang sudah dibuat mulai dari kepulauan,

kawasan, hingga program tahunan. Sehingga perencanaan BPIW menjadi perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan menjadi acuan unor di lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu, ia menambahkan, BPIW juga perlu fokus pada program-program unggulan masing-masing pusat sesuai tugas dan fungsi. “Program unggulan atau *champion*, seperti ITMP KSPN, Anjungan Cerdas, Kota Baru dan program unggulan lainnya,” jelas Hadi.

Hadi juga menyatakan, BPIW sudah waktunya untuk semakin berani melakukan sosialisasi hasil kerja kepada Unor di lingkungan Kementerian PUPR. “Termasuk, terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara audiensi ke K/L lain,” terang Hadi. **(ris/infoBPIW)**

# Kunjungi Cipta Karya, Kepala BPIW Bahas Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur

Jajaran pimpinan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Kepala BPIW, Hadi Suahyono melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Rabu (1/8).

**“Kunci pelaksanaan infrastruktur yang baik adalah kebersamaan dan kesepakatan, siapa mengerjakan apa,” tutur Hadi.**

Rombongan BPIW ini diterima langsung Dirjen Cipta Karya, Danis H Sumadilaga beserta jajarannya. Hadi menyatakan, pertemuan tersebut merupakan awal yang baik agar keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dapat terus dilakukan. Sebelumnya Hadi beserta

pimpinan lainnya di BPIW telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga, Sugiyartanto.

Dalam pertemuan itu juga memunculkan kesepakatan bersama bahwa perencanaan infrastruktur dilaksanakan di BPIW. Sedangkan Cipta Karya berperan sebagai eksekutor dari perencanaan yang telah dibuat BPIW. “Kunci pelaksanaan infrastruktur yang baik adalah kebersamaan dan kesepakatan, siapa mengerjakan apa,” tutur Hadi.

Kedepan, menurutnya, akan dibuat tim kerja bersama di tingkat eselon II dan eselon I. Kerja tim ini untuk memperjelas apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak.

“Misalnya, kita di BPIW sudah punya rencana dukungan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Danau Toba. Cipta Karya punya rencana induk air di Danau Toba. Ini yang harus kita jadikan satu kesatuan menjadi keterpaduan PUPR,” ungkap Hadi.



Jajaran BPIW dan Ditjen Cipta Karya melakukan rapat koordinasi.

Sumber: Dok. BPIW

Dirjen Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa memang perlu dilakukan koordinasi dengan BPIW terkait perencanaan infrastruktur PUPR. Apalagi menurut Danis BPIW telah diamanahkan Menteri PUPR untuk menjadi *leader* perencanaan infrastruktur PUPR.

“BPIW juga dapat melakukan sinergitas dengan lembaga di luar Kementerian PUPR, seperti Kementerian Perhubungan dan lembaga lain yang berhubungan dengan infrastruktur,” papar Danis.

Menurut Danis, Cipta Karya bagian dari infrastruktur PUPR, yaitu infrastruktur permukiman. “Makro *planning* PUPR mulai Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, semuanya dari BPIW.

Kemudian diturunkan kepada kami untuk didetailkan infrastruktur permukimannya,” ujar Danis.

Danis menjelaskan, pertemuan tersebut selain menyamakan persepsi, juga untuk menyepakati

**BPIW telah diamanahkan Menteri PUPR untuk menjadi induk *planning* infrastruktur ke PUPR-an**

untuk kerja tahun 2019. “Untuk 2019 kita cek kembali, kalau ada yang kurang kita lengkapi. Kemudian kita menyiapkan 2020-2024,” terangnya. Ia berharap, BPIW dapat menjadi arah perencanaan di Kementerian PUPR, termasuk akan menjadi dasar

perencanaan teknis bagi Ditjen Cipta Karya.

Dari BPIW, kegiatan ini dihadiri beberapa pejabat seperti Sekretaris BPIW, Firman H. Napitupulu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR,

Bobby Prabowo, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga. Kemudian dari Ditjen Cipta Karya

dihadiri Sekretarisnya, Rina Agustin Indriani, para pejabat eselon 2 dan 3. **(Hen/ris/infobpiw)**

## 4 Komponen Alokasi Pembiayaan Pengembangan 3 KSPN Prioritas

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah menyusun *Integrated Tourism Masterplan Program* (ITMP) di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang akan menggunakan anggaran dari dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air.

"Total dana bantuan Bank Dunia dalam pengembangan pariwisata itu sebesar 300 juta dolar Amerika," ungkap Hadi saat paparan "Rencana Penggunaan Dana Pinjaman Bank Dunia Terkait Pembangunan Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Prioritas" dalam acara "Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, akhir pekan lalu. Dalam rapat

yang dihadiri seluruh perwakilan kementerian dan lembaga ini, Hadi menerangkan, total penggunaan dana dari Bank Dunia akan meliputi empat komponen.

Komponen pertama meliputi, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua meliputi, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih.

"Komponen ketiga meliputi, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Adapun, komponen keempat meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata," jelas Hadi.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, komponen pertama ada beberapa kegiatan, seperti penyiapan rencana induk pariwisata terpadu/ITMP, rencana induk sektoral di tingkat hilir, pengembangan kelembagaan, pembangunan kapasitas untuk perencanaan daerah di kawasan wisata terpilih. "Ada juga merekrut



Hadi Sucahyono paparandi depan seluruh perwakilan kementerian/lembaga.

Sumber: Dok BPIW

konsultan kelas dunia yang akan menyediakan program manajemen pendukung.

Konsultan tersebut juga menyediakan manajemen perencanaan proyek untuk penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, koordinasi dan kegiatan lainnya," terangnya.

Untuk komponen kedua, Hadi menjelaskan, ada beberapa kegiatan seperti, pembiayaan untuk sarana

transportasi di destinasi pariwisata terpilih sesuai dengan standar nasional.

"Ada juga pengembangan infrastruktur dan pelayanan pariwisata, seperti sarana lalu lintas bagi pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor, pembangunan taman, ruang terbuka hijau serta peningkatan fasilitas daerah untuk angkutan umum," terang Hadi.

Selain itu, untuk pembangunan pelayanan infrastruktur dasar dan pariwisata. "Seperti penyediaan akses air bersih, pengelolaan sampah,

juga pemberian bantuan teknis untuk lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan teknik dan sekolah kejuruan," paparnya.

Untuk elemen keempat, lanjutnya, akan meliputi kegiatan persiapan dan pembaruan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan, melaksanakan promosi pasar, melakukan pemantauan untuk proyek investasi dan lainnya.

Hadi menerangkan, komponen pertama akan mendapat alokasi anggaran 22 juta dolar Amerika,

Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan digelar dalam rangka mempersiapkan program pariwisata nasional terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia berharap, kegiatan tersebut akan membuat seluruh kementerian dan lembaga mengetahui mengenai program pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan begitu,

**Komponen ketiga mendapat alokasi anggaran 37,1 dan komponen keempat akan mendapat alokasi anggaran 1,3 juta dolar Amerika.**

lanjutnya, seluruh kementerian/ lembaga dapat bersama-sama mendukung dalam mewujudkan pengembangan pariwisata. "Baik yang terkait kegiatan fisik maupun nonfisik," terangnya.

Di tempat sama, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani mengatakan, pihaknya kini sudah siap melakukan berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsi kementerianya.

"Ranah kami ada di komponen empat, ada pun kegiatannya meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, melalui peningkatan standard kompetensi, pembinaan dan pelatihan," terang Rizki.

Termasuk, lanjutnya, pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas usaha, pelatihan peningkatan pemasaran *online*, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi dan monitoring hingga manajemen proyek. **(ris/infoBPIW)**

komponen kedua mendapat alokasi anggaran 239,6 juta dolar Amerika, komponen ketiga mendapat alokasi anggaran 37,1 dan komponen keempat akan mendapat alokasi anggaran 1,3 juta dolar Amerika. Sehingga, totalnya sesuai dengan jumlah dukungan Bank Dunia 300 juta dolar Amerika.

Sebelumnya di tempat yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Wismono Adi Suryabrata mengatakan, rapat *Kick off* Tim Koordinasi Program

# BPIW Samakan Persepsi untuk Menentukan Program Prioritas di Kementerian PUPR

Guna menyamakan persepsi dalam menentukan program dan pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek (PJP) 2021-2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Indikator Sikronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastuktur PUPR di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri seluruh perwakilan Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Sumber

Daya Air, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat menyampaikan

**Untuk tahun 2019 mayoritas dari keseluruhan usulan pembangunan baru di Kementerian PUPR masih masuk ke dalam stok program.**

arahan mengatakan, untuk tahun 2019 mayoritas dari keseluruhan usulan pembangunan baru di Kementerian PUPR masih masuk ke dalam stok program. "Program yang

baseline Pra Konreg 2018 sebanyak 523 program, namun yang masuk stok Pra Konreg 2018 sebanyak 1.224 program," terang Iwan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang efektif dalam mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastuktur PUPR, ungkap Iwan, diperlukan penentuan prioritas dengan rumusan indikator dan kriteria yang tidak bersifat sektoral, namun perlu mencerminkan kinerja pengembangan wilayah. "Yakni program yang lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan," terang

Iwan.

Indikator dan kriteria yang menjadi dasar dalam perumusan program harus terukur, sehingga akan dengan mudah dapat di evaluasi.



Iwan Nurwanto saat membuka kegiatan

Sumber: Dok. BPIW

la menyatakan indikator dan kriteria yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan program dan anggaran yang sifatnya *money follow* program.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Mangapul L. Nababan menerangkan, proses penyusunan PJP 2021-2023 terdapat beberapa tahapan.

"Tahap pertama adalah Evaluasi Kawasan Prioritas Nasional Tahun 2015-2019. Untuk tahap ini meliputi antara lain, target jumlah kawasan, keterpaduan pembangunan, evaluasi program prioritas, serta tindak lanjut pencapaian target tahun 2015-2019," terang Mangapul.

Untuk tahap kedua, lanjut Mangapul, Penentuan Kawasan Prioritas Baru Untuk Periode Tahun 2020-2024. Pada tahap kedua meliputi pengumpulan data primer dan

**Indikator dan kriteria yang dikembangkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan program dan anggaran yang sifatnya *money follow* program.**

sekunder terkait potensi kawasan setingkat provinsi/kabupaten/kota, arahan pengembangan kawasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahap ketiga adalah indikasi kegiatan yang mempunyai potensi dapat meningkatkan pertumbuhan dan *readiness criteria* (dokumen kriteria kesiapan) untuk mendukung pengembangan kawasan prioritas 2020-2024.

la berharap, ke depan program di Kementerian PUPR semakin sinkron dan efektif dalam mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastuktur PUPR. **(ris/InfoBPIW)**

# Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Gelar Pengembangan Kapasitas SDM

Demi mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)" di Kabupaten Kuningan, akhir pekan lalu.

Acara ini dihadiri Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan jajaran di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan

Strategis, BPIW Kementerian PUPR. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, untuk meningkatkan kinerja BPIW tentu sangat memerlukan kerja sama antar pegawai, antar bidang hingga antar pusat. "Kerjasama yang baik menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kinerja," ujar Hadi.

Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono mengatakan, semua jajaran di BPIW berkerja sama-sama. "Kita saling percaya, kalau saling percaya satu sama lain jadi enak kerja,

tidak ada beban. Tidak perlu saling mengguguli satu sama lain yang penting bertanggungjawab," terang Kuswardono.

Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan kunjungan lapangan ke Proyek Pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung proses pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat. Pada hari kedua, kegiatan diisi dengan aktivitas *Team Building*



Hadi Sucahyo memberikan pengarahan

Sumber: Dok. BPIW



Meninjau langsung pembangunan infrastruktur PUPR sektor Sumber Daya Air

Sumber: Dok. BPIW

yang berisi permainan dan olahraga bersama, mulai dari senam pagi, sepakbola, permainan konsentrasi kelompok dan kekompakan.

Selain aktivitas *team building*, kegiatan ini juga diisi dengan ramah tamah dan perkenalan dengan pejabat baru di Lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, yakni Kuswardono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Maulidya Indah Junica sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, dan Bernadi Haryawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis.

## Kunjungan ke Bendungan Kuningan

Kegiatan "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pusat Pengembangan Kawasan Strategis" ini diisi dengan kunjungan lapangan ke Proyek Pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Bendungan tersebut merupakan salah

satu dari beberapa program Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

**Bendungan Kuningan bermanfaat untuk sumber air baku dengan kapasitas 300 liter/detik, mengalir di Daerah Irigasi (DI) Cileuweung dan Jangkelok seluas 3.000 Ha, pengendali banjir dan dapat menghasilkan listrik hingga 500 Kw di Kabupaten Kuningan.**

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pembangunan infrastruktur PUPR, terutama sektor Sumber Daya Air. Rombongan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Kuningan, Pri Dodhy Agbar dan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai,

Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Permadi Radityo.

Pri Dodhy menjelaskan pembangunan bendungan ini upaya pengelolaan sumber daya air sesuai yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai

(BBWS) Cimanuk - Cisanggarung. Rencana pembangunan ini termuat dalam Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung.

Bendungan Kuningan bermanfaat untuk sumber air baku dengan kapasitas 300 liter/detik, mengalir di Daerah Irigasi (DI) Cileuweung dan Jangkelok seluas 3.000 Ha, pengendali banjir dan dapat menghasilkan listrik hingga 500 Kw di Kabupaten Kuningan. "Adapun

pembangunan bendungan dimulai pada tahun 2013 dan direncanakan akan selesai konstruksi akhir tahun 2018," terangnya. **(rizkita)**

# Penyusunan ITMP Danau Toba Dorong Pengembangan Kawasan Pariwisata

Destinasi Danau Toba

Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar *Kick Off Meeting* penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau atau *for Lake Toba* di Medan (23/07) lalu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono serta dihadiri oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah. Menurut Kuswardono, penyusunan ITMP ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kuswardono menyatakan, "*Integrated ITMP for Lake Toba* adalah sebuah upaya untuk mendukung pengembangan dan pembangunan KSPN Danau Toba melalui pendekatan terpadu dan komprehensif untuk semua aspek dan sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat (K/L), tingkat daerah maupun lintas pelaku di tingkat masyarakat, swasta dan badan pengelola terkait.

Konsekuensi dari dilakukannya penanganannya ini adalah dibutuhkan pendekatan penanganannya secara kolaboratif antar pemangku kepentingan di lintas sektor dan

lintas tingkat pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk kelembagaan penanganan berupa Kelompok Kerja (Pokja).

Pada sesi diskusi kegiatan tersebut, beberapa kalangan yang hadir seperti lintas K/L, pemerintah daerah, dan akademisi memberikan beragam

Proses penyusunan ITMP *for Lake Toba* ini akan berlangsung selama 12 bulan kedepan. Untuk itu forum koordinasi seperti ini masih akan terus dilaksanakan

sudut pandang, isu-isu, masukan, dan dukungan terutama dari Pemerintah Daerah di Sumatera Utara terhadap proses penyusunan ITMP Danau Toba.

Diharapkan penyusunan ITMP Danau Toba ini dapat menjadi langkah progresif pemerintah dalam melakukan inovasi pengembangan pariwisata di Danau Toba secara sinergis. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ika Hardina Lubis, Kasubbid Ekonomi, Bidang Perencanaan Ekonomi,

Kemaritiman, dan SDA, Bappeda Sumatera Utara pada saat acara ini berlangsung.

Sebagai dukungan terhadap penyusunan ITMP Danau Toba, *World Bank* bersama dengan Kemenko Bidang Kemaritiman telah melakukan penyusunan dokumen berjudul *Developing a Roadmap for Improving Water Quality of Lake Toba Tourist Destination* yang memuat salah satunya kajian terkait kualitas air.

Dokumen ini dapat menjadi masukan bagi Tim Penyusun ITMP *for Lake Toba* dan *stakeholder* terkait kajian teknis seperti tata guna lahan, upaya revitalisasi dan preservasi lingkungan, hingga pemanfaatan badan air Danau Toba secara berkelanjutan.

Proses penyusunan ITMP *for Lake Toba* ini akan berlangsung selama 12 bulan kedepan. Untuk itu forum koordinasi seperti ini masih akan terus dilaksanakan guna menghasilkan produk *masterplan* yang mendapat dukungan semua pihak dalam implementasinya. **(Tiara/Hen/infobpiw)**

## Mengembangkan Tanjung Lesung Menjadi "Bali Baru"



Pantai Tanjung Lesung penuh pesona

Sumber: Istimewa

Tanjung Lesung. Ya, kawasan pantai yang berada di ujung Pulau Jawa ini boleh dibilang pantai "Perawan nan Cantik". Perawan karena kawasan pesisir ini masih belum banyak disentuh pembangunan, kendati begitu Tanjung Lesung menyimpan segudang pesona alam. Terutama, pantainya yang berpasir putih dengan gelombang ombak yang sangat bersahabat, sehingga banyak orang jatuh hati dengan pesona kawasan destinasi yang berlokasi di Provinsi Banten ini.

Pesona Tanjung Lesung memang tidak kalah dibanding wisata pantai kelas dunia di Tanah Air, seperti Bali ataupun Lombok. Keindahan Tanjung Lesung tak hanya dapat dinikmati dari pantai berpasir putih saja, namun panorama bawah laut yang menyimpan beragam keindahan terumbu karang dan berbagai macam biotanya.

Tak mengherankan, Tanjung Lesung dipilih pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas dikembangkan. 10+2 KSPN sendiri merupakan destinasi wisata di Tanah Air yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi dunia atau dikenal dengan istilah "Bali Baru".

10+2 KSPN tersebut antara lain, KSPN Tanjung Lesung di Banten, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) di Jawa Timur, Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandeh di Sumatera Barat dan Toraja di Sulawesi Selatan.

Sebagai KSPN Prioritas 10+2, Tanjung Lesung mendapat perhatian khusus, agar kawasan wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Terlebih, modal pesona alam yang dimiliki Tanjung Lesung sangat luar biasa.

Guna memacu percepatan pengembangan KSPN Tanjung Lesung menjadi "Bali Baru", Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah membuat perencanaan sejumlah program terpadu pengembangan infrastruktur PUPR yang terdokumentasi pada *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) KSPN Tanjung Lesung.

Dukungan infrastruktur yang memadai terhadap KSPN tersebut, dipastikan akan memiliki peranan besar dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengakui, KSPN Tanjung Lesung merupakan salah satu KSPN yang mendapat prioritas untuk dikembangkan. Pengembangan KSPN Tanjung Lesung sendiri diharapkan akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.

"Terlebih KSPN Tanjung Lesung pada tahun 2019 ditargetkan mendapat kunjungan satu juta wisatawan mancanegara dan lima juta wisatawan dalam negeri," ungkap Hadi. Saat jumlah kunjungan wisatawan banyak, tentunya akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata dan sekitarnya. Bahkan ekonomi negara. Kunjungan wisatawan asing yang banyak akan membuat penerimaan

**Pengembangan KSPN Tanjung Lesung diharapkan akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut**



Tanjung Lesung.

Sumber: Kemen PUPR

devisa negara juga bertambah. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata yang direncanakan dan dikelola dengan baik memang akan menciptakan peluang lapangan kerja yang banyak.

Pasalnya, sektor pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, kafe, transportasi dan lainnya.

Dengan begitu, ungkap Hadi, KSPN Tanjung Lesung perlu mendapat sentuhan infrastruktur PUPR dengan mantap, baik di kawasan menuju destinasi wisata maupun di kawasan dalam destinasi wisatanya sendiri.

Hadi meyakini, peningkatan prasarana dan pelayanan dasar yang berhubungan dengan pariwisata sangat penting dalam pengembangan kepariwisataan. Untuk itu, Kementerian PUPR pada tahun 2018 ini melakukan sejumlah penanganan di wilayah KSPN Tanjung Lesung.

la mencontohkan, ada program penanganan jalan. "Untuk jalan misalnya, ada pelebaran jalan dan rekonstruksi ruas Jalan Pasauran-Labuan - Cibaliung, Jalan Citereup-

Tanjung Lesung, termasuk pelebaran jalan di rusa Jalan Sumur - Cibaliung - Muara Binuangeun" tuturnya.

Selain itu, ada juga pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang yang dapat mendukung peningkatan akses ke KSPN Tanjung Lesung dan diharapkan proses konstruksinya akan segera dimulai.

Tanjung Lesung, penataan Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Desa Cikadu, pengembangan desa wisata dan program lainnya," urai Hadi.

Adapun terkait pengelolaan sumber daya air antara lain, ada program pengaman pantai ruas Panimbang-Tanjung Lesung, pengamanan Pantai Jongor, Kemuning, dan Caringin, dan Penyediaan Sarana Air Baku Citeureup Majasari Kabupaten Pandeglang.

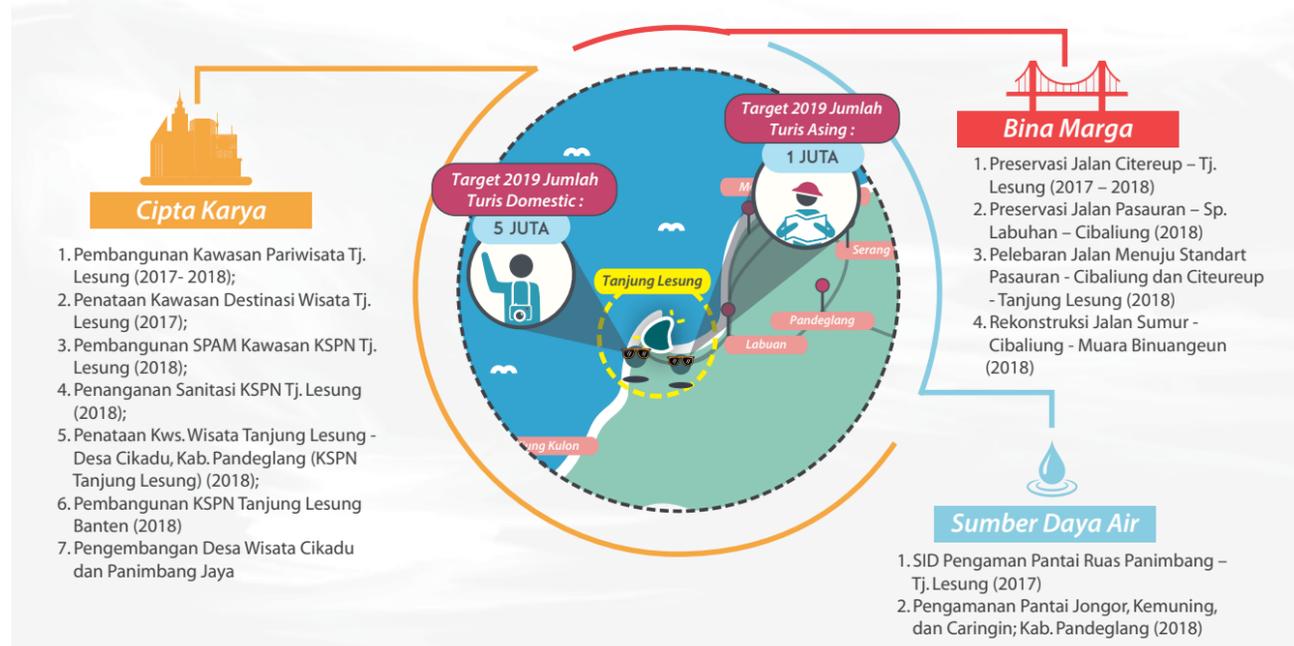
"Untuk penyediaan perumahan, antara lain seperti program pembangunan rumah khusus untuk nelayan, termasuk rumah khusus untuk pondok pesantren dan lainnya lagi," tegas Hadi. **(Tim Redaksi)**

**KSPN Tanjung Lesung perlu mendapat sentuhan infrastruktur PUPR dengan mantap, baik di kawasan menuju destinasi wisata maupun di kawasan dalam destinasi wisatanya sendiri**

Kemudian ada juga penanganan infrastruktur permukiman atau sektor keciptakaryaannya. Sejumlah program keciptakaryaannya untuk pembangunan di kawasan pariwisata Tanjung Lesung, antar lain penataan kawasan destinasi wisata Tanjung Lesung, pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) kawasan Tanjung Lesung.

"Ada juga penanganan sanitasi KSPN

**PENGEMBANGAN KSPN TANJUNG LESUNG**



# Masterplan dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya merupakan salah satu dari 40 Pusat Pertumbuhan Baru Keterkaitan Kota – Desa dalam RPJMN 2015-2019. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya secara administratif terletak di Kecamatan Keruak dan Jerowaru yang berada di bagian selatan Kabupaten Lombok Timur. Wilayah kawasan praya terdiri dari 14 desa dengan luas 114,086 Km<sup>2</sup> atau sekitar 62% dari luas wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dan 7,01% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur.

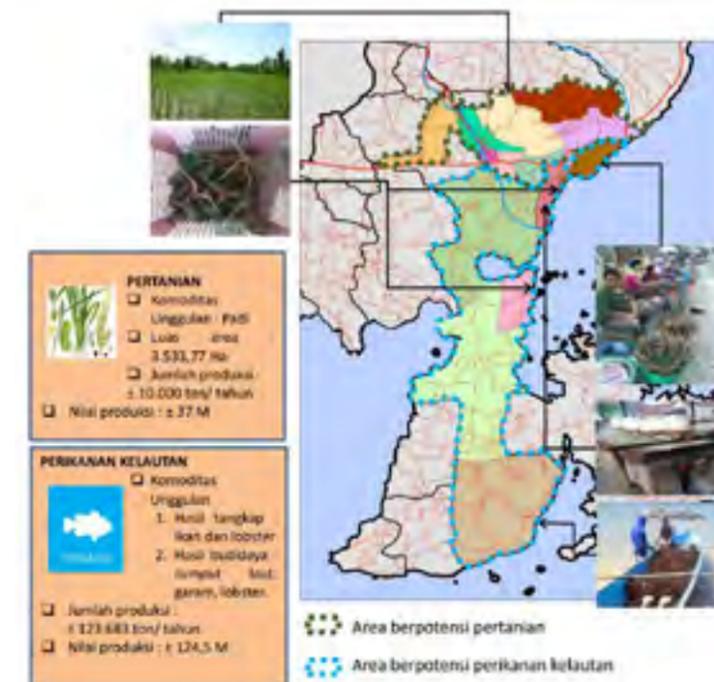
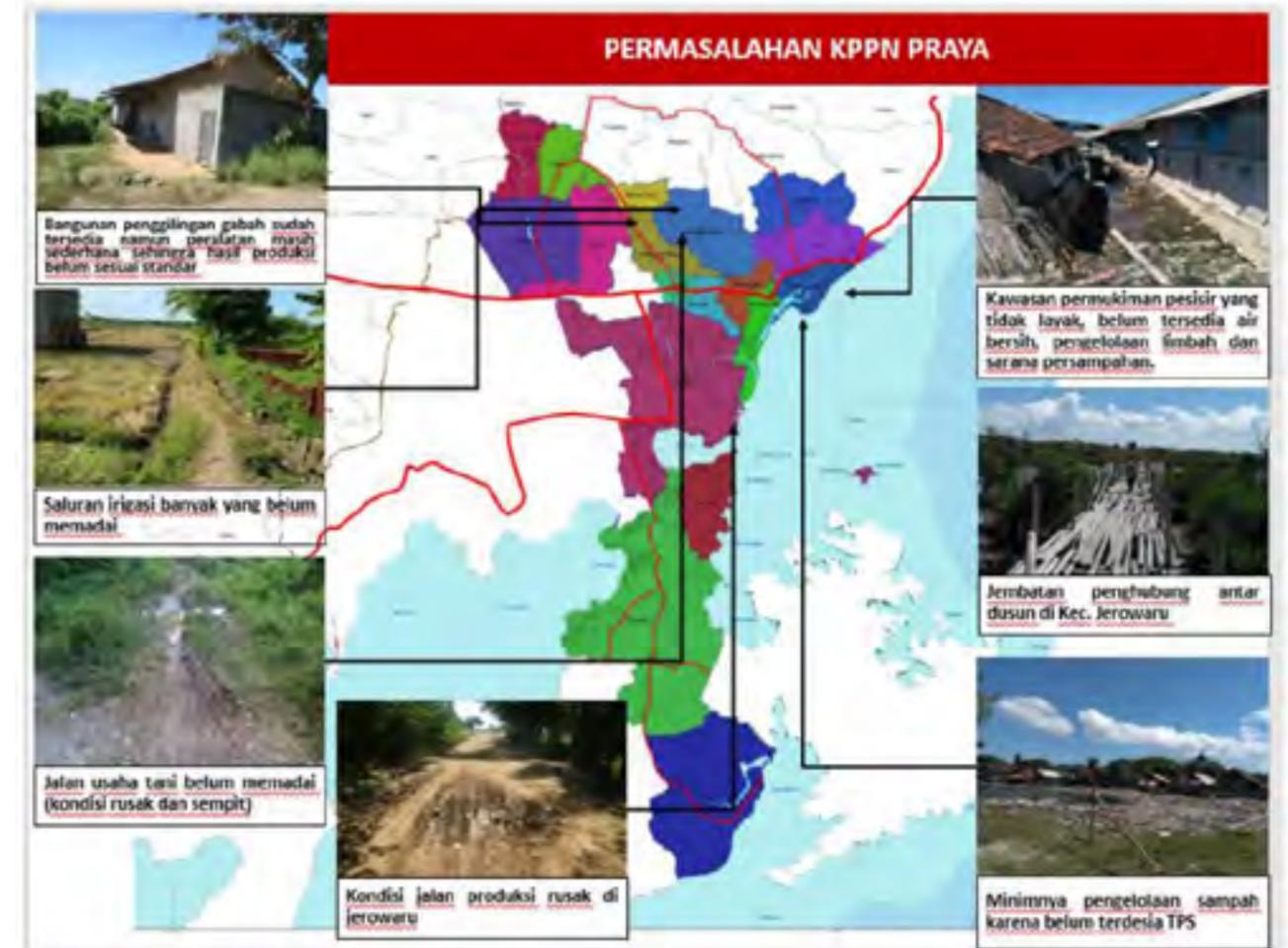
KPPN Praya termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 16 Pusat Pertumbuhan sedang berkembang Tanjung – Mataram – Mandalika

Mandalika. Secara geografis letak dan posisi KPPN Praya dalam WPS tersebut menjadi *hinterland* bagi kawasan Mandalika. Dalam RT/RW, arah pengembangan Kabupaten Lombok Timur berbasis perikanan, kelautan dan pertanian. Adapun hierarki dalam sistem perkotaannya antara lain:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) berada di Kota Selong berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Masbagik, Labuan Lombok (Kecamatan Pringgabaya) dan Kecamatan Keruak.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP) berada di Terara, Sakra, dan Aikmel
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa antara lain: Jerowaru di Kecamatan Jerowaru; Rensing di Kecamatan Sakra Barat; Lepak di Kecamatan Sakra Timur; Montong Betok di Kecamatan Montong Gading; Sikur di Kecamatan Sikur; Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela; Suralaga di Kecamatan Suralaga; Suela di Kecamatan Suela; Wanasaba di Kecamatan Wanasaba; Sembalun Lawang di Kecamatan Sembalun; dan Sambelia di Kecamatan Sambelia.

5. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) Kec. Keruak berada di tanjung luar dan Kec. Jerowaru berada di Sukaraja.

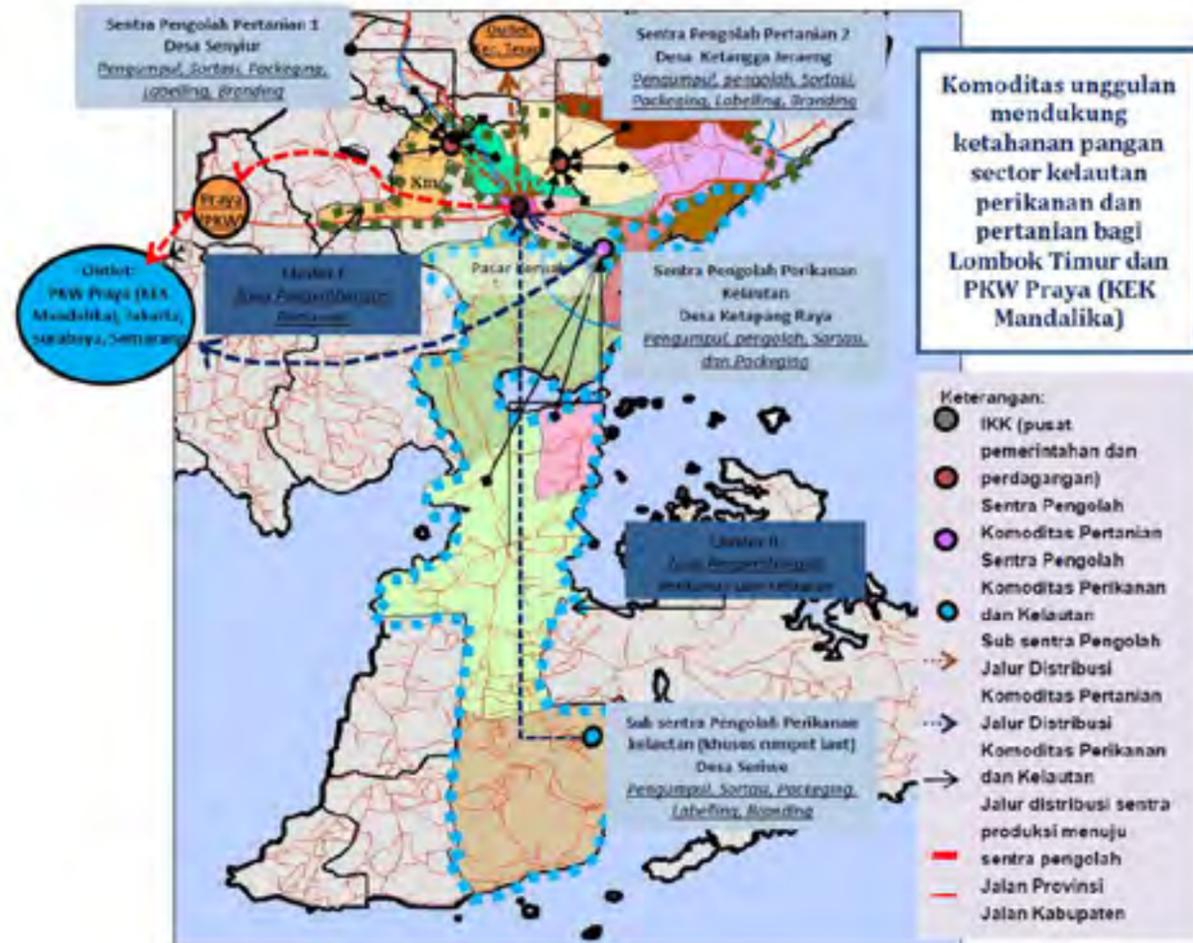


KPPN Praya memiliki dua jenis potensi kawasan, yaitu perikanan kelautan dan pertanian. Teridentifikasinya dua potensi disebabkan oleh KPPN Praya terletak di bagian ujung timur dan selatan pulau Lombok sehingga berbatasan langsung dengan laut, maka tidak hanya potensi daratan yang dimiliki tetapi juga perikanan kelautan karena penduduk memiliki akses langsung menuju laut.

KPPN Praya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sektor kelautan perikanan dan pertanian bagi Lombok timur dan PKW Praya (KEK Mandalika). Perwujudan arahan pengembangan tersebut dilakukan dengan membagi kawasan menjadi dua klaster, yaitu klaster I zona pengembangan pertanian dan klaster II zona pengembangan perikanan

kelautan. Sentra produksi terletak di seluruh desa pada masing - masing zona, sementara sentra pengolah terdapat di masing - masing zona secara terpisah. Klaster I diarahkan memiliki dua sentra pengolah sebagai upaya efisiensi jarak pelayanan. Sementara klaster II diarahkan memiliki 1 (satu) sentra pengolah dan 1 (satu) sub sentra pengolah

dengan komoditas yang berbeda. Alur distribusi barang diarahkan beranjak dari sentra produksi diolah pada sentra pengolah kemudian didistribusikan kepada sentra pemasar yang terpusat pada sentra perdagangan local di pasar keruak. Adapun skema pengembangan kawasan dijelaskan pada gambar berikut.



Dalam mewujudkan pengembangan KPPN Praya dibutuhkan tahapan agar pengembangan kawasan dapat terlaksana sesuai rencana antara lain:



**1. Peningkatan Infrastruktur sentra produksi dan pengolah**

- Pengembangan sentra pengolahan komoditas kelautan perikanan dan sentra produksi komoditas perikanan.
- Peningkatan sentra produksi komoditas kelautan perikanan dan sentra pengolahan komoditas pertanian.
- Pengembangan sentra pemasaran lokal



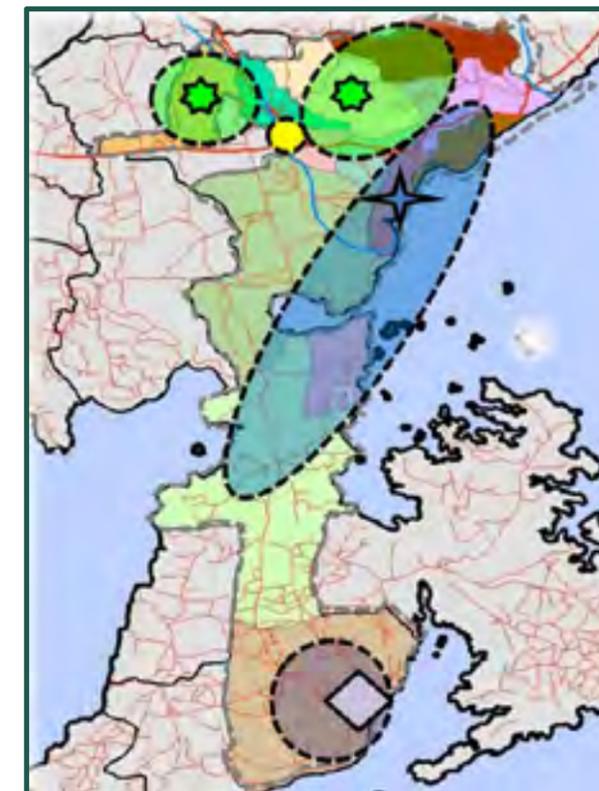
**2. Peningkatan Infrastruktur permukiman kawasan**

- Penataan sistem pengelolaan sampah kawasan.
- Pemenuhan prasarana dan sarana dasar
- Penataan kawasan kampung nelayan dan/ atau rumah tidak layak huni



**3. Pengembangan SDM dan Kelembagaan**

- Pembinaan SDM melalui pelatihan berdasarkan jenis komoditas
- Pengembangan BUMdes selaku kelembagaan permodalan bagi kelompok tani/ budidaya

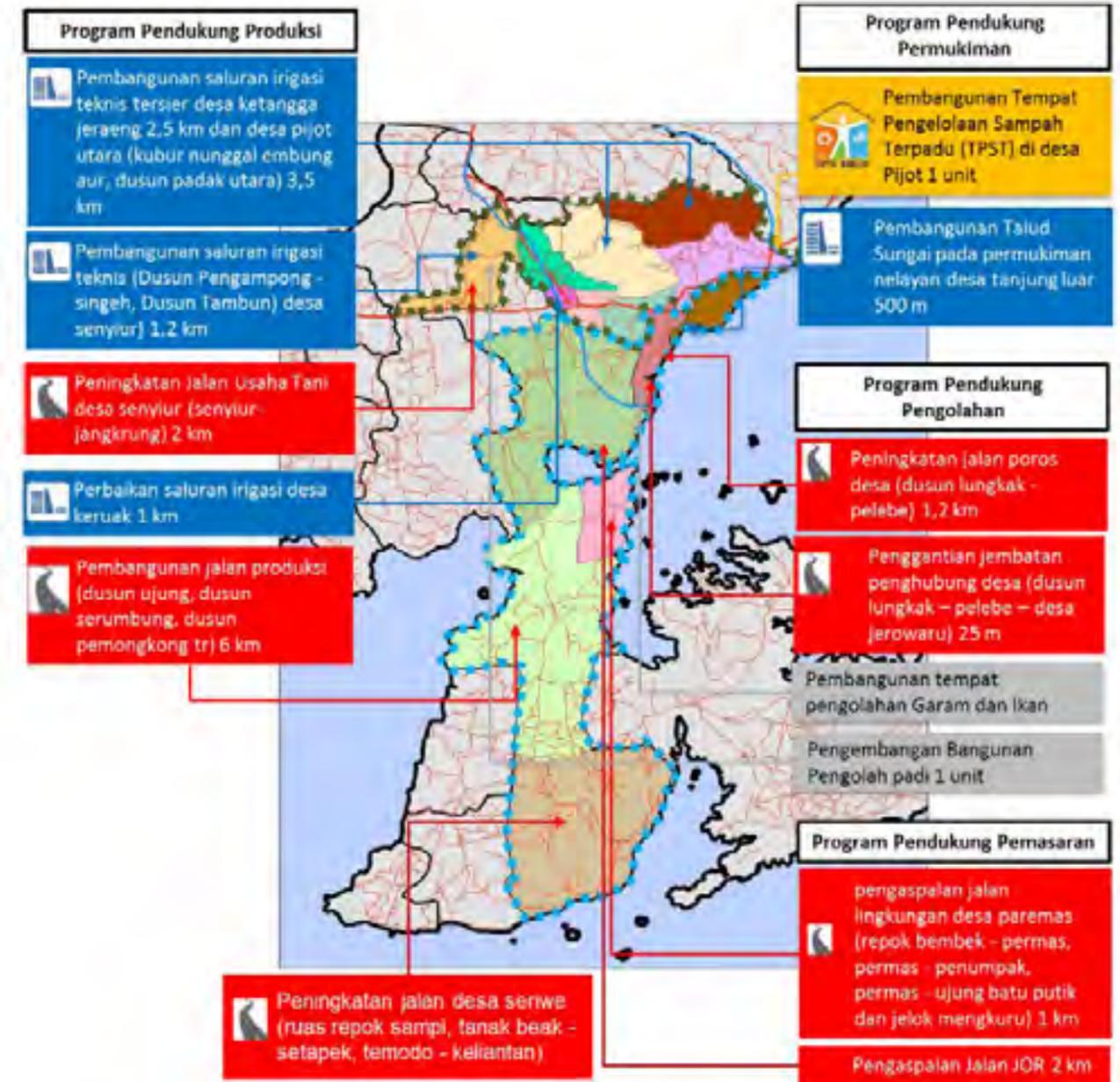
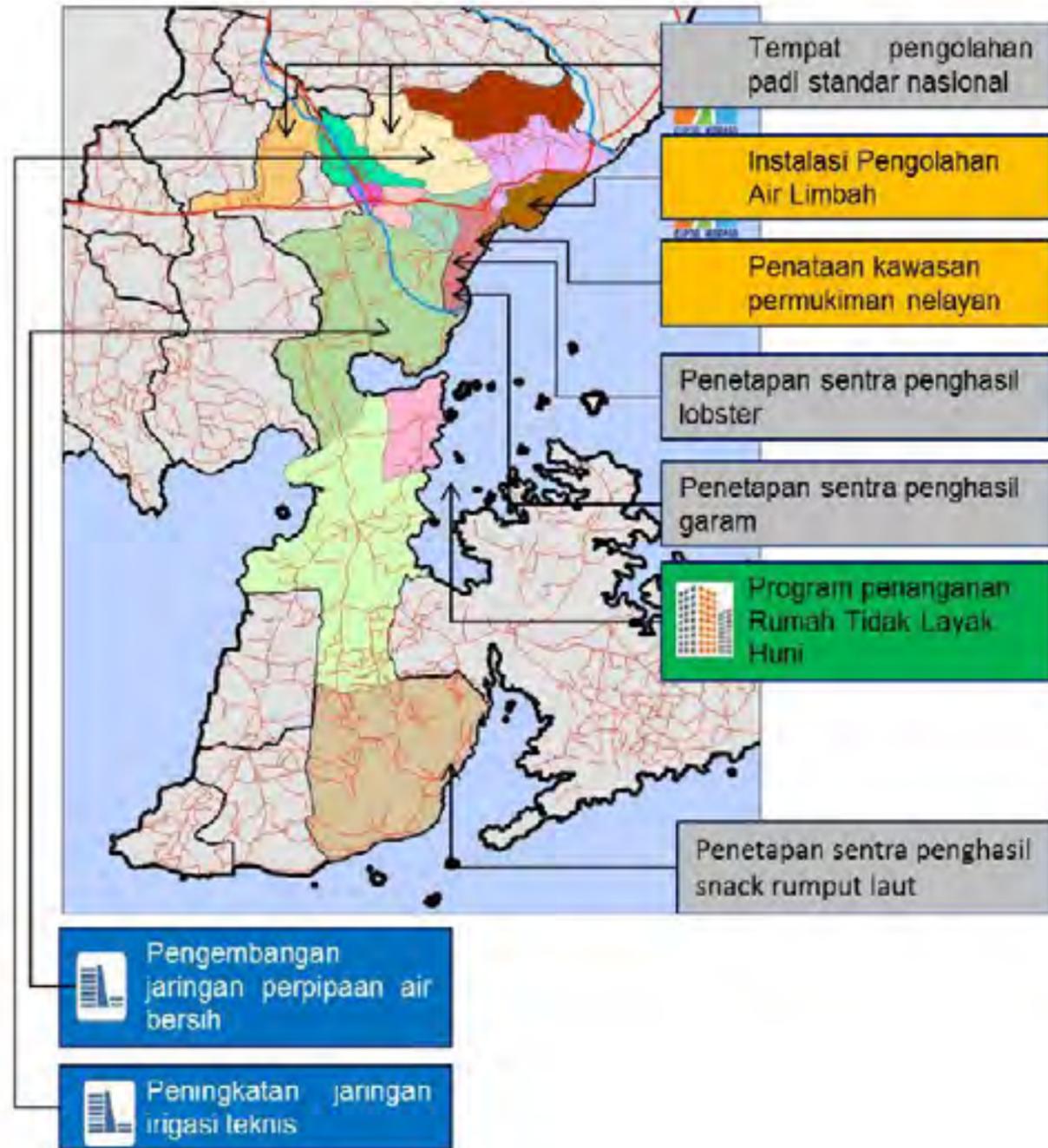


- Sentra Produksi dan pengolahan Kelautan dan perikanan
- Sentra Produksi dan pengolahan Kelautan dan perikanan
- Sentra Produksi dan pengolahan pertanian (padi)
- Pusat KPPN Keruak Praya/ Ibukota Kec. Keruak
- Sentra pemasaran lokal
- Simpul akses menuju ibukota Kab. Lombok Timur dan PKW Praya

## Masterplan KPPN Praya

Masterplan ini disusun dalam kerangka jangka waktu 10 tahun seperti yang tertuang dalam peta masterplan

pengembangan infrastruktur KPPN Praya. Pengembangan KPPN Praya diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.



Development Plan KPPN Praya untuk periode 5 tahun pertama yaitu periode tahun 2017-2021. Program-program tersebut terdiri dari kegiatan PUPR dan Non PUPR. Program yang termasuk kedalam kegiatan PUPR dijabarkan menjadi 4 Unor pelaksana di Kementerian PUPR yaitu Ditjen Bina Marga,

Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Penyediaan Perumahan. Sedangkan untuk kegiatan Non PUPR tidak dijelaskan eksplisit melainkan sebatas kewenangan pada level kementerian dan SKPD teknis di level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. **(Alis/Farhan/Fitri)**



Jalan di sperdesaan

Sumber: Istimewa



**Program pendukung kegiatan Minapolitan**

**Kontur Relatif datar**

**Rencana pengembangan:**

1. Peningkatan jalan poros desa 600 m
2. Penggantian Jembatan 60 x 4 m
3. Peningkatan jalan poros desa (JOR) 2 km

**Lokasi :**  
Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru

**Justifikasi:**

- Penghubung antar dusun, antar desa
- Akses rumah nelayan dan produksi budidaya lobster
- Akses Industri rumah tangga ikan dan garam
- Akses menuju pelabuhan telong-elong
- Jalan produksi budidaya lobster dan ikan (keramba apung) di Ds. Jerowaru

**Legenda:**

- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Gudang Lobster
- Zona permukiman
- Zona budidaya garam
- Perairan budidaya lobster
- Rencana Pengembangan
- Arah pelabuhan Telong-elong di Ds. Jerowaru
- Arah menuju TPI Tanjung Luar

**Rencana tempat pengolahan ikan dan garam**



## Menilik Sejarah Asal Muasal Kota-Kota Indonesia

Buku ini menyajikan fakta-fakta mengenai sejarah dan asal-usul 97 kota besar di Indonesia. Sebagian besar kota-kota tersebut sudah terkenal, berstatus otonom/ mandiri, dan merupakan ibukota Provinsi. Kota-kota tersebut telah berkembang pesat bahkan beberapa menjadi kota modern (metropolitan). Wajahnya telah dan akan terus berubah seiring berkembangnya zaman, tetapi riwayat dan asal-usulnya takkan pernah berganti, tetap abadi sampai nanti.

**Judul Buku :**  
Asal-Usul Kota-kota di Indonesia Tempoe Doeloe  
**Penulis :**  
Zaenuddin HM  
**Penerbit :**  
Change  
**Tahun Terbit :** 2013  
**Jumlah Halaman:** 612 halaman  
**ISBN:** 978-602-1139-30-1

Dari riset yang dilakukan penulis, ada banyak hal menarik terkait sejarah dan asal-usul ke-97 kota tersebut. Ada nama kota yang berasal dari nama pohon, dari kejadian di zaman kerajaan, dan dari sebuah peristiwa kecil yang tidak disengaja, dari ucapan spontan tokoh masyarakat, dari bahasa yang dipakai penduduk awal, dan dari hal-hal lainnya yang kadang terkesan berbau mistis. Semuanya unik dan menggelitik.

Dan yang pasti, mayoritas kota-kota tersebut memiliki sejarah yang panjang. Ada sejumlah kota yang usianya mencapai puluhan abad, hampir setua negeri ini. Meski pernah menjadi jajahan portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang, kebanyakan kota besar di Indonesia juga menjadi basis penting dalam gerakan perjuangan kemerdekaan republik ini.

Lewat buku inilah kita akan memperoleh informasinya secara lebih fokus dan beragam. Tak cuma riwayat dan asal-usulnya, juga dilengkapi dengan foto-foto klasik keadaan kota-kota itu tempo dulu, yang dapat membangkitkan nostalgia terutama bagi mereka yang pernah mengalaminya pada puluhan atau ratusan tahun yang silam.

“Adanya konsep Kota Pusaka yang dicanangkan pemerintah tentunya sangat berkaitan erat dengan sejarah kota-kota tersebut. Pelestarian pusaka kota sangat berkaitan erat dengan perjalanan sejarah kota yang terprasasti dalam situs-situs sejarahnya.”

Beginilah barangkali cara membaca sejarah—khususnya tentang kota-kota besar di Indonesia—tanpa harus mengerutkan dahi, tapi justru dengan rileks, santai dan menyenangkan. Adanya konsep Kota Pusaka yang dicanangkan pemerintah tentunya sangat berkaitan erat dengan sejarah kota-kota tersebut. Pelestarian pusaka kota sangat berkaitan erat dengan perjalanan sejarah kota yang terprasasti dalam situs-situs sejarahnya.

# Potensi Pembiayaan Infrastruktur PUPR Non-APBN Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia



**Dr. Dita S.N.A Diliani, S.Sos., M.Si**

*Analisis Perencana pada Bidang Penyusunan Renstra dan Analisa Manfaat Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut-kan bahwa salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan Pemerintah wajib adalah pembangunan infrastruktur. Pada kenyataannya kewajiban pemerintah untuk mengadakan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak didukung oleh kemampuan pembiayaan pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, kerjasama investasi baik dengan pihak swasta ataupun badan usaha bahkan lembaga donor internasional untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur telah dilakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu.

Di sisi lain, pemerintah pusat setiap tahunnya juga menyalurkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dana-dana ini pun hanya memberikan porsi yang sangat sedikit untuk infrastruktur karena terserap sebagian besar untuk belanja pegawai. Tentunya hal ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah

pusat dalam usahanya mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur.

Bukankah otonomi daerah dengan asas desentralisasinya memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya?. Selain itu, mampukah daerah mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya sendiri?. Ternyata, ada beberapa daerah otonom yang mampu mencari sumber pembiayaan infrastrukturnya sendiri walaupun untuk infrastruktur yang nilainya kecil.

Capaian ini perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat mulai berpikir untuk mengurangi ketergantungannya dengan pembiayaan dari APBN dan dapat mendukung usaha pemerintah pusat dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan (Mei-Juni 2018) tim Sub Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa

## Contoh Identifikasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR di Daerah

Sektor	Proyek	Nilai Proyek	Sumber Pembiayaan	Kab/Kota
Bina Marga	Pembangunan Jalan Bypass Maminasata	976 Milyar	APBN	Makassar
Bina Marga	Pembangunan Jalan Layang AP Pettarani	2 Trilyun	Swasta/PINA	Makassar
Bina Marga	Pembangunan Underpass Simpang Mandai	174 Milyar	APBN	Makassar
Cipta Karya	SPAM Regional Maminasata	900 Milyar	APBN, APBD, KPBU	Makassar
Bina Marga	Pembangunan Jembatan Kayu	478 Juta	CSR	Kutai Kertanegara

Manfaat Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR melakukan kunjungan ke beberapa kota dan kabupaten di Indonesia dalam rangka kegiatan penyusunan *Roadmap* Skema Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.

Beberapa kota dan kabupaten yang dijadikan sampel dalam kajian ini antara lain Kota Batam, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Papua, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Yahukimo.

Tujuan dilakukannya kunjungan ke kabupaten dan kota tersebut yaitu untuk mengetahui potensi (kemampuan) yang dimiliki masing-masing daerah dalam rangka membangun infrastruktur ke-PUPR-an di wilayahnya.

Dalam sistem keuangan otonomi daerah dikenal dengan adanya istilah Dana Perimbangan yaitu suatu mekanisme pendanaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Prinsip utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terciptanya daerah (kabupaten/kota) yang mandiri mampu membangun daerahnya dengan potensi yang dimiliki.

Namun pada kenyataannya, setelah 18 tahun diterapkannya otonomi daerah, daerah yang ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) belum mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari daerah induknya.

Hal ini telah dikaji oleh *United Nation Development Program* di tahun 2008 dan Abdul Hakim (2017) dalam studinya tentang Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik studi kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kondisi ini turut mempengaruhi dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana dana dari pemerintah pusat masih menjadi tempat bergantung bagi daerah dalam membangun wilayahnya.

**Dalam sistem keuangan otonomi daerah dikenal dengan adanya istilah Dana Perimbangan yaitu suatu mekanisme pendanaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.**

Sedangkan disisi lain, pertumbuhan anggaran infrastruktur pemerintah pusat setiap tahunnya tidak linier dengan kebutuhan pembangunan/ pengelolaan infrastruktur PUPR itu sendiri sehingga terjadi *gap funding* (kesenjangan pendanaan).

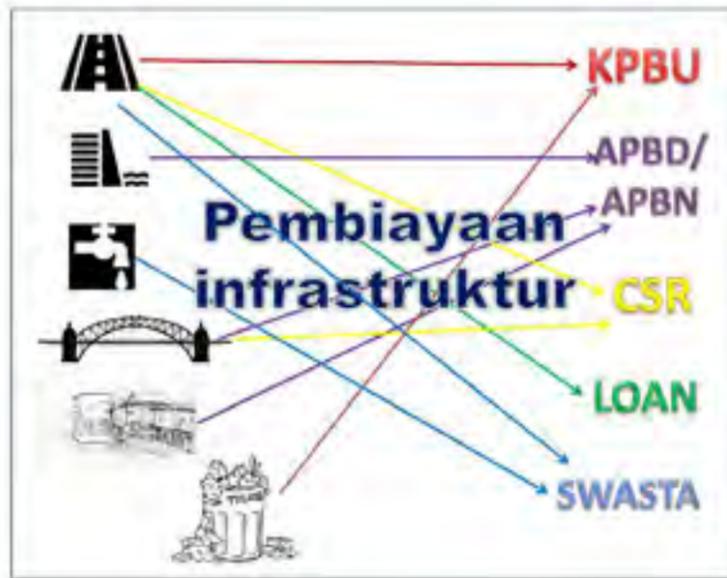
Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya sumber pendanaan selain APBN yang

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud terutama terkait dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan peringkat penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 beberapa daerah tersebut di atas menjadi sampel dari kegiatan identifikasi potensi dan resiko pembiayaan infrastruktur PUPR ini.

Berdasarkan kunjungan ke instansi pemerintah daerah antara lain Badan Pengembangan dan Perencanaan Daerah

*\*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*



(BAPPEDA), Dinas ke-PUPR-an, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta instansi lain yang terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah diperoleh informasi bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada APBN.

Beberapa daerah yang sudah menggunakan sumber pembiayaan non-APBN/APBD dalam pembangunan infrastrukturnya antara lain:

1. Kabupaten Kutai Kertanegara melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan Jembatan Kayu Desa Sedulang Kec. Muara Kaman;
2. Kota Makassar melalui swasta (PT Bosowa Marga Nusantara) untuk pembangunan jalan Tol Layang AP Pettarani;
3. Kota Surabaya melalui CSR untuk pembangunan *underpass* Mayjen Sungkono dan Jembatan Ujung Galuh;
4. Kota Batam melalui swasta untuk pelayanan SPAM dan KPBU untuk pengelolaan sampah;
5. Kota Balikpapan untuk pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang dilakukan melalui mekanisme KPBU dengan sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah provinsi (APBD) Kalimantan Timur, APBN, investor dan *loan* (Cina);
6. Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan sumber pembiayaan KPBU untuk pembangunan JLT/Tol Timur.

Sedangkan untuk kabupaten Bintan dan kabupaten Pinrang masih mengandalkan sumber pembiayaan APBN/APBD, padahal kedua daerah tersebut memiliki potensi daerah yang cukup menarik untuk menarik swasta sebagai sumber

pembiayaan. Misalnya, akses jalan menuju Kawasan Industri Lobam di Kabupaten Bintan dapat dibangun dengan dana bersumber dari perusahaan yang ada di kawasan tersebut dengan mekanisme seperti yang dilakukan PT REI untuk membangun *underpass* Mayjen Sungkono.

Begitu juga dengan kabupaten Pinrang dimana terdapat perusahaan Cina yang bergerak untuk mengolah rumput laut maka akses jalan menuju pabrik tersebut dapat dikerjasamakan dengan menggunakan dana APBD dan perusahaan Cina tersebut.

Ada tiga hal utama yang menjadi dasar lemahnya pembiayaan infrastruktur di daerah baik melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha ataupun dengan pihak swasta, yaitu:

1. Pola pikir yang masih mengandalkan anggaran pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan pembiayaan non-pemerintah disebabkan *political will* yang kurang kuat dari para pemangku kebijakan;
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk pembangunan infrastruktur pada umumnya terkendala pada kemasan (*packaging*) yang dapat membuat pekerjaan tersebut layak secara finansial. Walaupun pemerintah pusat melalui mekanisme *Viability Gap Fund* dapat membantu daerah untuk mengatasi masalah *packaging* tersebut namun nilai minimum yang dapat didukung harus memiliki nilai minimum 100 milyar;

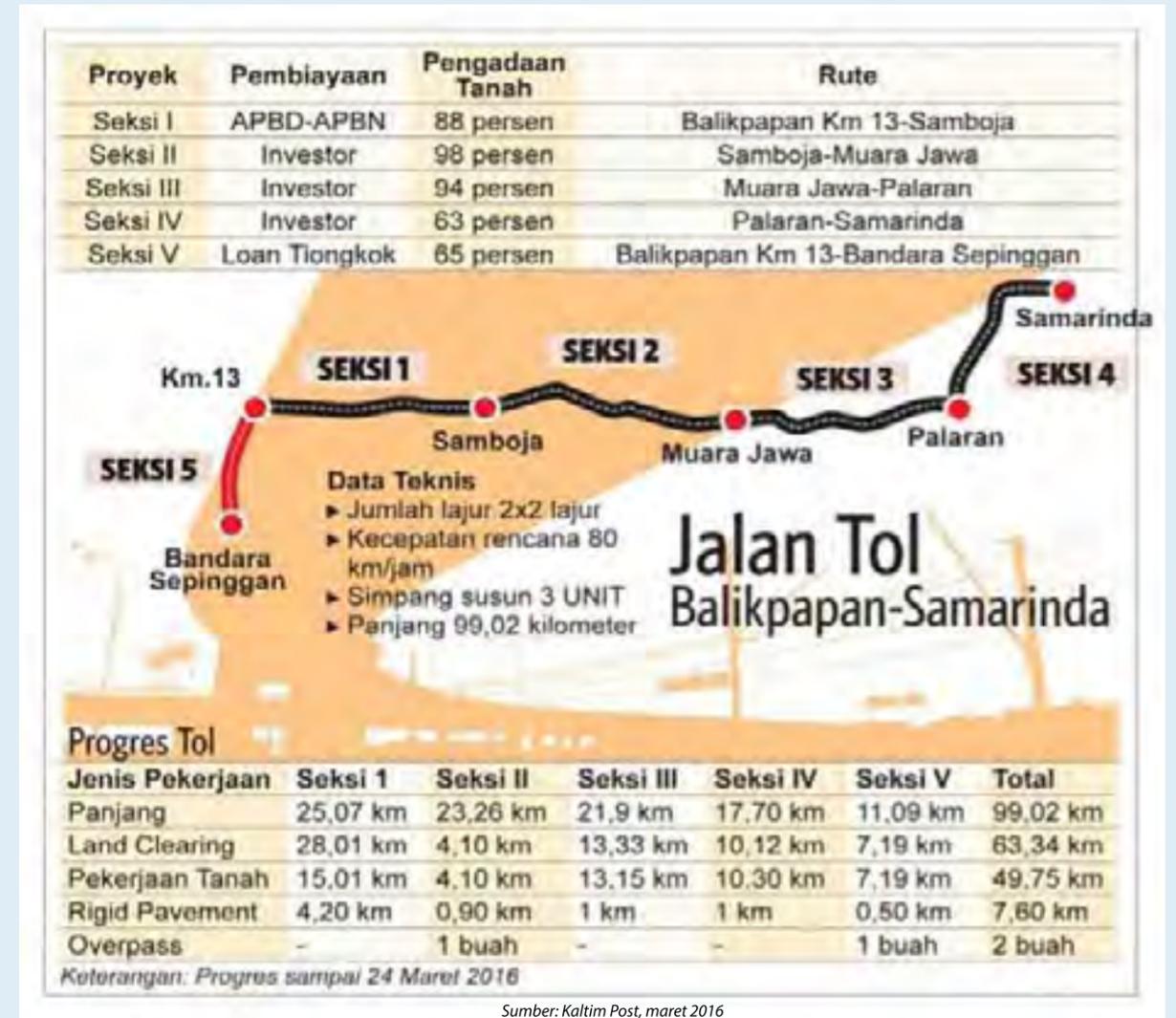
Walaupun sebagian besar pembiayaan infrastruktur PUPR di daerah masih mengandalkan APBN, namun pada dasarnya daerah kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembiayaan infrastruktur PUPR di daerahnya sendiri.

3. Beberapa daerah menyatakan keengganannya menggunakan skema KPBU karena dianggap prosesnya terlalu lama terutama yang pekerjaannya memerlukan persetujuan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) dan tentunya ini juga terkait dengan regulasi yang mengaturnya.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kunjungan ini adalah bahwa walaupun sebagian besar

pembiayaan infrastruktur PUPR di daerah masih mengandalkan APBN, namun pada dasarnya daerah kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembiayaan infrastruktur PUPR di daerahnya sendiri selama infrastruktur yang dimaksud memiliki manfaat yang sangat signifikan.

Misalnya, pembangunan *Underpass* Mayjen Sungkono dibangun untuk mengatasi kemacetan pada kawasan Bundaran Satelit yang merupakan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa. Sumber pembiayaan merupakan patungan dana dari beberapa pengembang di wilayah



Sumber: Kaltim Post, Maret 2016

Surabaya Barat yang dikoordinir oleh Dewan Perwakilan Daerah *Real Estate* Indonesia (DPD REI) Jawa Timur. Dari nilai proyek senilai 75 milyar, diperkirakan 44 milyar bersumber dari patungan para pengembang dan sisanya direncanakan berasal dari perusahaan jasa perhotelan yang ada di sekitar *underpass* tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemerintah pusat perlu mensosialisasikan *best practice* pembiayaan berbasis kerjasama dengan badan usaha atau swasta di daerah kabupaten/kota yang pembangunan infrastrukturnya dianggap memiliki potensi untuk dibiayai dengan skema melalui kerjasama atau *pure non-pemerintah*.

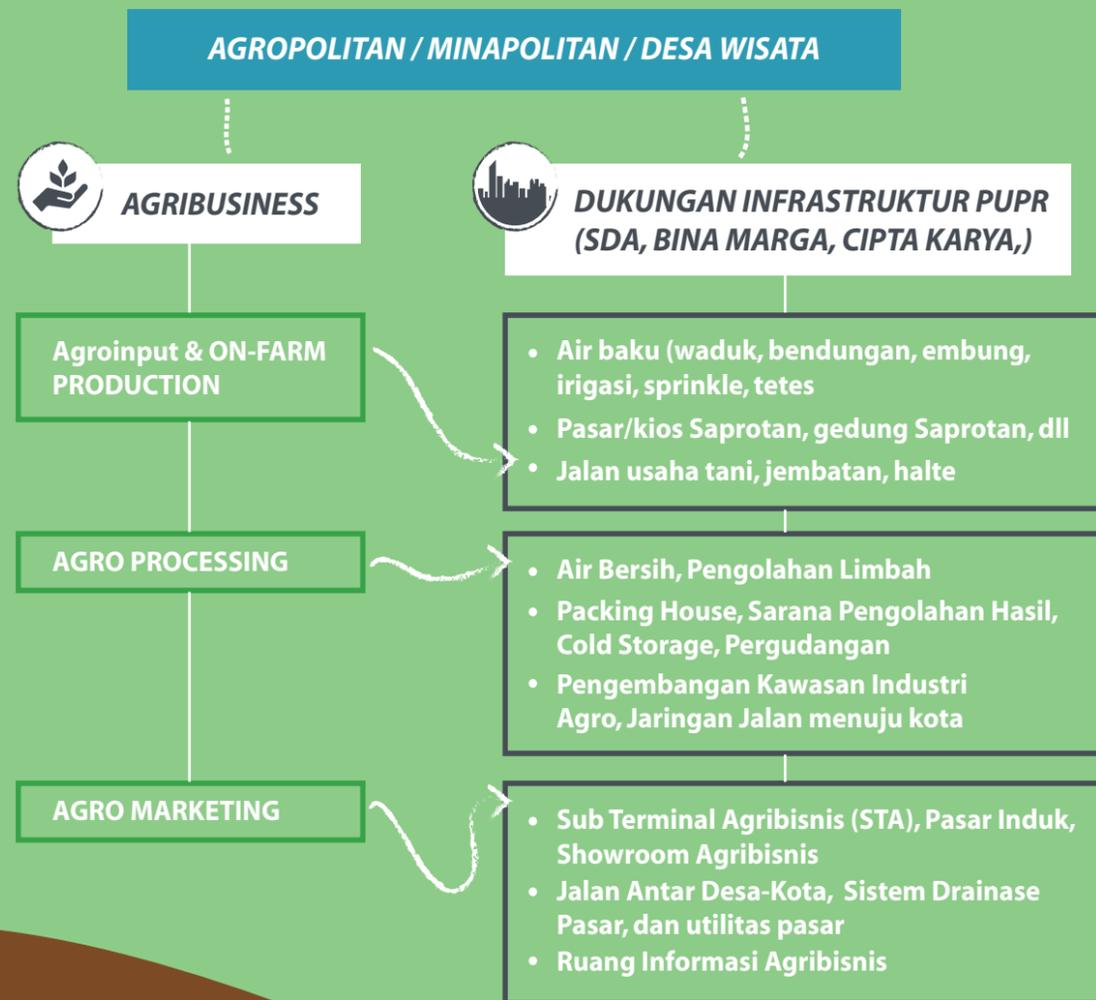
Dengan menyampaikan *best practice* tersebut, diharapkan daerah kabupaten/kota lain dapat mengambil contohnya dan mulai berpikir untuk dapat mengatasi permasalahan pembiayaan infrastruktur di daerahnya tanpa bergantung dengan anggaran pemerintah sepenuhnya. Terakhir, kejelasan regulasi menjadi hal penting lainnya dalam menentukan

keberhasilan terbentuknya kerjasama dengan pihak badan usaha atau swasta. Tanpa aturan yang jelas, maka badan usaha atau swasta tidak akan tertarik untuk melakukan kerjasama.

Diharapkan, dengan mengoptimalkan sosialisasi terkait jenis pembiayaan non-APBN/APBD dan dasar regulasinya kepada pemerintah daerah, kemampuan untuk menggunakan potensi lokal dalam menarik minat swasta atau badan usaha untuk melakukan pembiayaan infrastruktur akan lebih meningkat dan ketergantungan pembiayaan infrastruktur bersumber dari APBN/APBD dapat ditekan dan tujuan dari desentralisasi otonomi daerah untuk mewujudkan daerah yang otonom/mandiri akan tercapai.

# DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

## SASARAN 1 : Peningkatan Ekonomi Kawasan



## SASARAN 2 : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kawasan

### DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR (CK dan PnP)

- Air Minum
- Pengolahan Sanitasi, Limbah, dan Persampahan
- Penataan Lingkungan Permukiman (perbaikan jalan poros desa, dll)
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Rumah Tidak Layak Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui perencanaan dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), memiliki dua sasaran dukungan terhadap pengembangan kawasan perdesaan. Sasaran pertama, peningkatan ekonomi kawasan melalui dukungan beberapa program dari Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Program dukungan infrastruktur PUPR terkait agribisnis ini seperti penyediaan air baku dan jalan antar desa-kota. Kemudian, sasaran kedua adalah pemenuhan standar pelayanan minimum kawasan melalui beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, seperti pengolahan sanitasi dan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk rumah tidak layak huni.

# Destinasi Favorit Kepulauan Kei Maluku Tenggara

Seindah - indahnya, secantik-cantiknya destinasi luar negeri, namun tidak kalah cantiknya ketika kita berpergian ke negara sendiri. Terkadang kita sedikit menyepikan akan keindahan di Indonesia. Tanpa kita tahu, bahwa keindahan pulau-pulau di Indonesia ini memiliki berbagai potensi wisata bahari, seperti halnya Kepulauan Kei yang berada di Maluku Tenggara.

Menjejakkan kaki di pantai Kepulauan Kei akan menjadi sebuah pengalaman baru yang mungkin akan sangat jarang ditemukan di pantai-pantai lainnya di seluruh Indonesia. Secara geografis Kepulauan Kei ini terletak antara 5°-6° LS dan 131°-135,5°BT, dengan batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Irian Jaya bagian selatan, Sebelah Selatan dengan laut Arafura.

Berikut destinasi yang wajib dikunjungi ketika mengunjungi Kepulauan Kei, Maluku Tenggara:

## 1. Gua Hawang

Gua Hawang ini letaknya di kawasan Desa Letvuan. Gua Hawang ini dikenal sebagai destinasi wisata yang cukup tersembunyi namun memiliki mitos yang cukup menarik di belakangnya yang akan membuat perjalanan kita semakin menarik.

**Mitos yang sangat terkenal di Goa Hawang sendiri merupakan kutukan batu yang membuat seorang pria dan anjingnya berubah menjadi batu setelah mereka meminum air dalam goa tersebut**

Mitos yang sangat terkenal di Goa Hawang sendiri merupakan kutukan batu yang membuat seorang pria dan anjingnya berubah menjadi batu setelah mereka meminum air dalam goa tersebut namun kemudian malah mengeluarkan sumpah serapah. Nama

Hawang sendiri juga jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti arwah, sebab sebagian besar masyarakat di sana masih percaya jika di goa yang memiliki keindahan berupa kolam air sangat jernih beserta stalagtit cantik tersebut masih banyak didiami oleh hantu. Di lokasi wisata yang terletak di Desa Letvuan 15 km dari Langgur, daya tarik utama yang dimiliki adalah batuan-batuan stalagtit yang sangat menarik.

Di sana anda juga bisa melihat bagaimana perwujudan dari batu kutukan yang dimitoskan oleh masyarakat sekitar. Selain itu yang paling pasti menjadi daya tarik dari tempat ini adalah air dalam kolam alami di dalam goa yang sangat teramat indah berwarna biru dan sangat jernih.

## 2. Pantai Panjang

Pantai Panjang yang terletak di Pulau Kei Kecil di Maluku Tenggara merupakan salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pantai Panjang

Pulau Bair

yang dalam bahasa setempat disebut Ngurbloat ini memiliki garis pantai sepanjang 3 km Memiliki pasir pantai yang halus seperti tepung, merupakan salah satu daya tarik dari pantai ini.

Di area pantai ini, kita dapat menikmati waktu bersantai di bawah ribuan pohon kelapa yang menjuntai sambil berenang, berjemur di bawah sinar matahari dengan bermain pasir. Selain itu, wisatawan juga dapat menyelam karena 400 meter dari bibir pantai, terdapat jurang dan hamparan terumbu karang. Pantai ini selalu ramai di akhir pekan, dan di pantai panjang ini juga terdapat pendopo yang dapat dipakai oleh wisatawan.

## 3. Bukit Doa Masbait

Bukit Doa Masbait ini merupakan bukit tertinggi yang berada di kawasan Pulau Kei Kecil. Letaknya berada di Desa Kelanit. Bukit Masbait menjadi salah satu tempat wisata religi di Kepulauan Kei yang memiliki ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut (mdpl) ini, dapat kita capai menggunakan kendaraan, dilanjutkan

dengan berjalan kaki sekitar 30 menit. Bagi umat Katolik dan Kristiani, bukit ini kerap menjadi lokasi prosesi jalan Salib pada saat perayaan paskah.

## 4. Pulau Bair

Pulau Bair merupakan salah satu lokasi yang wajib dikunjungi jika berwisata ke Kepulauan Kei. Pulau ini berada di sebelah utara Kei. Untuk melakukan perjalanan ke Pulau Bair ini dapat ditempuh menggunakan perahu selama 1 jam dengan menggunakan *speedboard* dari Kei Kecil.

Perairan di Pulau Bair ini sangat jernih. Di pulau ini, kita bebas melakukan aktivitas seperti berenang, menyelam, hingga *snorkeling* dan tentu saja kita juga dapat berjemur. Jika tidak ingin basah, kita dapat menggunakan perahu yang dapat disewa untuk mengelilingi pulau ini.

Di Pulau Bair ini juga terdapat area yang dikenal sebagai lorong mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena lorong mati ini adalah nama daerah di mana ada dua tebing tinggi yang menyerupai

lorong sempit. Namun, keeksotisannya tak perlu dipertanyakan lagi. **(Indira/berbagai sumber)**



Dernaga Pulau Bair

Sumber: Istimewa

# Inilah 5 Besar dari 15 Pulau Terbaik Dunia Versi *Travel and Leisure*

Majalah dan situs berita, *Travel and Leisure* setiap tahun melakukan survei untuk penghargaan-penghargaan terbaik dunia (*World's Best*). Tahun 2018, *Travel and Leisure* melakukan survei kepada para pembaca untuk 15 pulau terbaik di dunia.

Ke 15 pulau terbaik di dunia tahun 2018 versi *Travel and Leisure* dari urutan 6 sampai 15, yakni urutan No 6. Palawan

di Philippines, No 7. Mauritius, No 8 Cebu di Philippines, No 9. Páros di Greece, No 10. Tasmania di Australia, No 11 Galápagos Islands di Ecuador, No 12. Cook Islands, No 13. Orkney Islands di Scotland, No 14. Maui di Hawaii dan No 15. Azores di Portugal.

Adapun urutan 5 besar sebagai Pulau Terbaik Dunia versi *Travel and Leisure*, sebagai berikut:



## 1. Jawa di Indonesia dengan skor 95.28

Juara umum diduduki oleh Pulau Jawa. Dilansir dari situs *Travel and Leisure*, Pulau Jawa dipilih karena memiliki pemandangan yang memesona serta kental dengan budaya masa lalu. Seperti, adanya situs warisan dunia yakni Candi Borobudur.

Pulau Jawa memiliki banyak pilihan destinasi wisata seperti air terjun, gunung berapi, taman nasional hingga pantai berpasir putih.

Sumber: Istimewa



## 2. Bali di Indonesia dengan skor 94.06

Keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Lokasi wisata yang utama adalah Kuta dan sekitarnya seperti Legian dan Seminyak, daerah timur kota seperti Sanur, pusat kota seperti Ubud, dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua dan Pecatu.

Bali sebagai tempat tujuan wisata yang lengkap memiliki banyak sekali tempat wisata menarik, antara lain Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Pantai Padang - Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pantai Lovina dengan Lumba Lumbanya, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan masih banyak yang lainnya.

Sumber: Istimewa

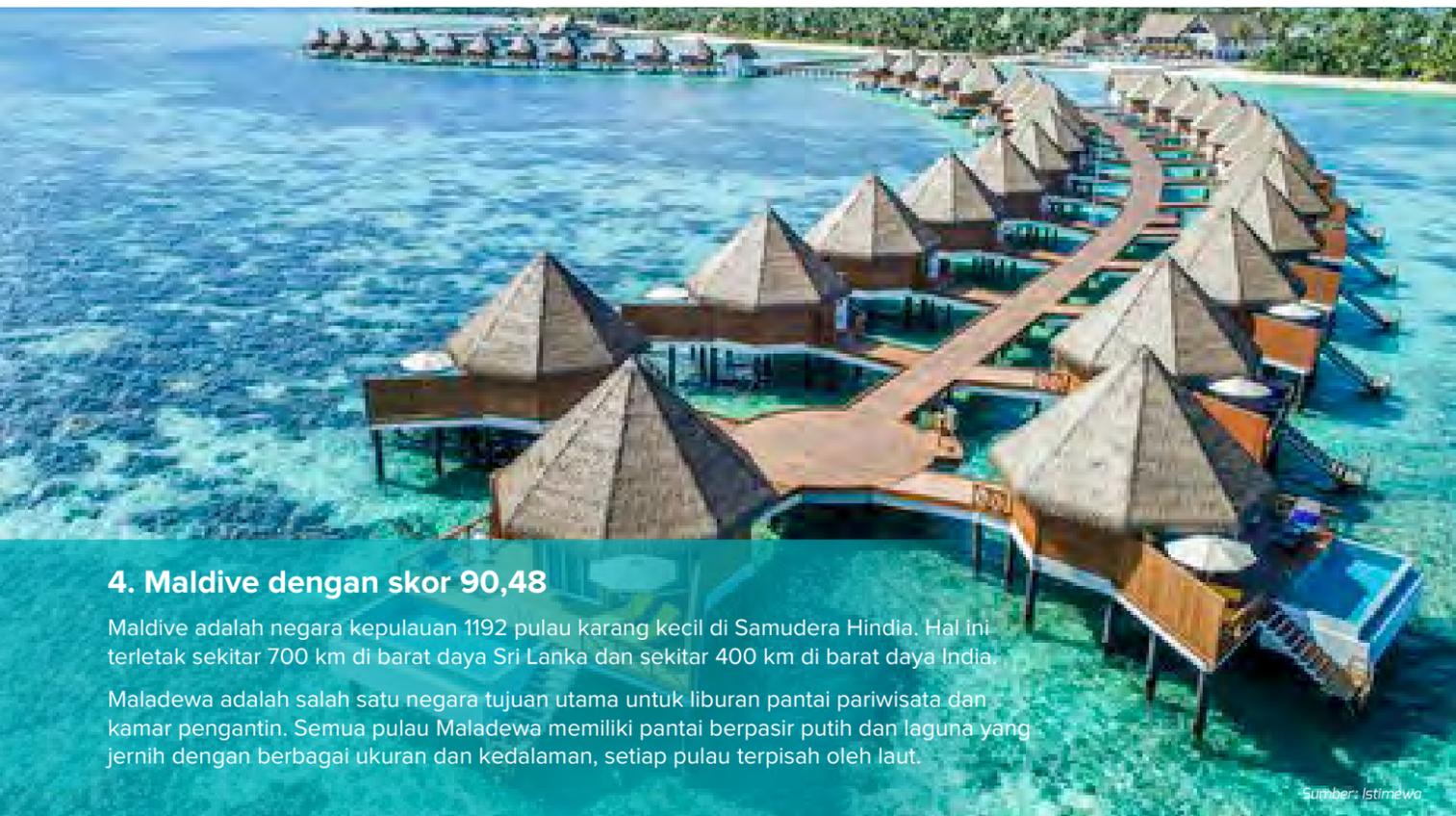
## 3. Lombok di Indonesia dengan skor 93.88

Lombok sebenarnya dalam banyak hal mirip dengan Bali. Destinasi objek pariwisata. Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab

Untuk wisata alam yang menarik di Lombok, antara lain Pantai Senggigi, Cakranegara, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, Pantai Kuta Lombok, Sembalun, Tetebatu, Air Terjun Senda dan lainnya.



Sumber: Istimewa



#### 4. Maldiva dengan skor 90,48

Maldiva adalah negara kepulauan 1192 pulau karang kecil di Samudera Hindia. Hal ini terletak sekitar 700 km di barat daya Sri Lanka dan sekitar 400 km di barat daya India.

Maladewa adalah salah satu negara tujuan utama untuk liburan pantai pariwisata dan kamar pengantin. Semua pulau Maladewa memiliki pantai berpasir putih dan laguna yang jernih dengan berbagai ukuran dan kedalaman, setiap pulau terpisah oleh laut.

Sumber: Istimewa

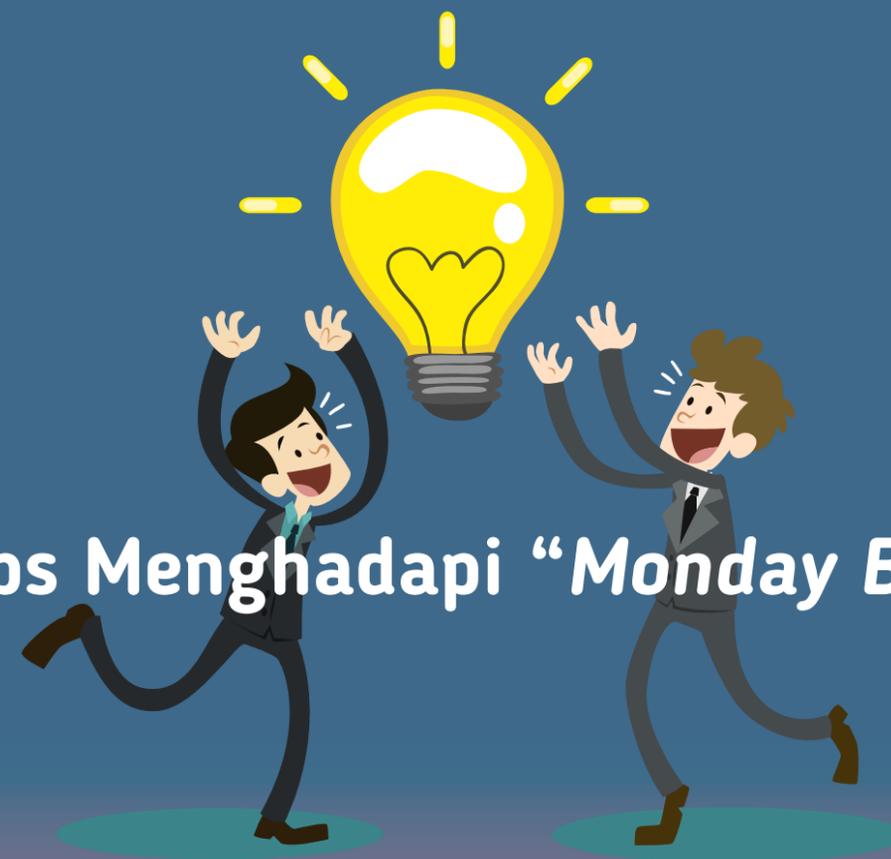


#### 5. Waiheke di New Zealand dengan skor 90.21

Waiheke merupakan terbesar kedua di New Zealand. Pulau ini juga yang terpadat dengan 8.000 penduduk tetap. Pulau ini mudah diakses karena layanan feri penumpang dan hubungan udara berjalan dengan baik. (\*/Berbagai Sumber)

Sumber: Istimewa

## 7 Tips Menghadapi “Monday Blues”



**H**ari Senin menandakan berakhirnya waktu akhir pekan. Sebagian orang menganggap hari senin menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Di hari senin, tidak hanya kembali berurusan dengan tugas-tugas kantor, tetapi juga harus menghadapi lalu lintas hari senin yang sangat macet.

Sindrom *monday blues* atau Senin kelabu merupakan perasaan malas yang berlebihan terhadap hari Senin setelah melewati nikmatnya akhir pekan. Meskipun begitu banyak hal yang harus dihadapi, berangkat bekerja di hari Senin merupakan satu hal yang tetap harus dilakukan. Berikut tips untuk menghadapi “Monday Blues”

#### 1. Istirahat yang cukup di hari Minggu

Pada Jumat malam dan hari Sabtu mungkin Anda menghabiskan waktu untuk bersenang-senang hingga larut malam. Untuk mengembalikan kondisi tubuh, pada hari Minggu sebaiknya Anda istirahat di rumah. Usahakan di hari Minggu Anda tidur selama 8 jam. Karena jika Anda terlalu banyak tidur atau kurang tidur akan menimbulkan perasaan malas di hari Senin.

#### 2. Mempersiapkan agenda

Buatlah sebuah agenda apa yang akan Anda lakukan di hari Senin dengan menuliskan agenda akan membantu Anda dalam menyingkirkan rasa malas. Anda bisa menuliskan beberapa tugas penting yang menjadi tanggung jawab Anda.

#### 3. Olahraga

Selain berfungsi untuk menyehatkan tubuh, olahraga juga memiliki fungsi yang baik sebagai pendorong produktivitas. Tubuh yang bugar dapat membantu Anda lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada.

#### 4. Sarapan dengan coklat

Coklat merupakan makanan pembangkit *mood*. Makan coklat dapat meningkatkan *level serotonin*, yang merupakan hormon anti-depresi, dan juga meningkatkan produksi endorfin, yaitu hormon yang membuat rileks. Ketika *mood* terjaga dan tubuh rileks, rasa malas akan hilang.

#### 5. Mandi dengan air dingin

Malas rasanya mandi di pagi hari, apalagi menggunakan air dingin. Tidak sedikit dari kita lebih memilih mandi dengan air hangat. Padahal

dengan mandi air dingin di pagi hari, selain lebih baik dibanding dengan air hangat, juga akan lebih menyegarkan dan ‘membangunkan’ fungsi tubuh Anda.

#### 6. Memilih pakaian kerja terbaik

Menjelang malam, siapkan baju lengkap dengan aksesoris yang akan Anda kenakan untuk hari Senin. Dengan memilih pakaian kerja terbaik dapat meningkatkan *mood* Anda. Selain nyaman, juga meningkatkan kepercayaan diri.

#### 7. Bertukar ide dengan rekan kerja

Cara lain yang dapat Anda lakukan agar hari Senin Anda dapat lebih bersemangat adalah dengan bertukar ide bersama rekan kerja. Pengalaman yang Anda dapat selama liburan dapat berguna sebagai masukan dan inspirasi tersendiri yang bisa dimanfaatkan saat bekerja. Siapa tahu Anda bisa menghasilkan berbagai ide kreatif dengan melakukan hal ini. (Indira/berbagai sumber)



Instalasi pengelolaan air

Sumber: Istimewa

# Pengembangan dan Penerapan Uprating Instalasi Pengolahan Air

Posisi capaian layanan air minum di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 73,7 persen, sedangkan untuk mencapai 100 persen masih sangat diperlukan target pencapaian tambahan sebanyak 26,3 persen. Solusi untuk dapat mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pembangunan baru dan *uprating* Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Tujuan dari *Uprating* IPA ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi air menjadi 2-3 kali lipat dari semula. Jika produksi meningkat, target untuk mencapai 100 persen dapat tercapai di tahun 2019. *Uprating* ini juga untuk meningkatkan debit produksi air.

Tujuan dari *Uprating* IPA ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi air menjadi 2-3 kali lipat dari semula. Jika produksi meningkat, target untuk mencapai

100 persen dapat tercapai di tahun 2019. *Uprating* ini juga untuk meningkatkan debit produksi air. Hasil olahan *uprating* juga telah memenuhi syarat dengan kualitas air minum. Untuk biaya investasi *uprating* IPA relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pembangunan IPA baru.

Perbandingan tersebut didapatkan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang mengamati penerapan *uprating* IPA pada beberapa kota di Indonesia. Puslitbang Perkim menunjukkan bahwa pembangunan IPA baru 4-5 kali lebih mahal dibandingkan dengan *uprating* IPA lama.

Selain itu, pembangunan IPA baru masih harus ditambah dengan biaya penyediaan lahan. Pada tahun 2016 Kementerian PUPR melakukan *Detail Engineering Design* (DED)



Instalasi pengolahan air tampak atas

Sumber: Istimewa

Tujuan dari *Uprating* IPA ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi air menjadi 2-3 kali lipat dari semula. Jika produksi meningkat, target untuk mencapai 100 persen dapat tercapai di tahun 2019

*pilot project uprating* IPA baja, *clarifier* kapasitas 50 L/detik menjadi 125 L/detik. Untuk penerapan yang dilaksanakan di PDAM Bhagasasi Bekasi. Terjadi kenaikan kapasitas produksi IPA mencapai 2,5 kali lipat dari kapasitas semula.

Kriteria desain IPA dibagi ke dalam unit operasi atau komponen yang menjadi kesatuan sistem proses pengolahan air, yaitu unit pengambilan air baku, unit pipa transmisi, unit alat ukur debit, unit pembubuhan koagulan, unit pengaduk cepat, unit pengaduk lambat, unit sedimentasi, unit penyaringan, unit reservoir, dan unit pendukung lainnya. Dari kesatuan sistem pengolahan, kualitas air hasil olahan yang harus mengacu pada suatu standar tertentu.

Secara garis besar, faktor-faktor yang memengaruhi desain IPA dibagi menjadi tiga. Pertama, debit atau kapasitas jumlah pemakai dan konsumsi air. Kedua, kualitas air yang dikaitkan dengan kesehatan dan baku mutu air yang berlaku. Ketiga, keberlanjutan (kontinuitas) pada sistem pelayanan air minum. Untuk kriteria Desain *Uprating* IPA yang merujuk pada SNI 6774:2008 memiliki beberapa penyesuaian diantaranya: Prapengolahan, Unit Koagulasi, Unit Flokulasi, Unit Sedimentasi, dan Unit Filtrasi.

Untuk desain *uprating* perlu memperhatikan faktor teknis dan nonteknis. Faktor teknis meliputi tipe atau jenis, debit, volume, dimensi dan satuan operasi, kriteria desain IPA *eksisting*, bahan, konstruksi, air baku, air olahan, kontinuitas layanan, dan lain-lain. Faktor nonteknis meliputi tingkat layanan air minum yang ada, bentuk jaminan layanan air minum kepada konsumen, IPA pengganti sementara, kapasitas tidak terpakai, air tidak berekening optimum, jumlah biaya/ modal *uprating* ketentuan tarif retribusi air minum, dan lain-lain.

Manfaat utama *uprating* IPA adalah meningkatkan kapasitas produksi IPA *eksisting* menjadi 2-3 kali lipat dan biaya investasi lebih murah dibandingkan dengan membangun IPA baru. Selain itu, *Break Event Point* (BEP) dari IPA *uprating* juga lebih cepat dibandingkan dengan IPA konvensional.

Teknologi *uprating* IPA dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk PDAM di seluruh Indonesia. Aplikasi metode *uprating* terbukti dapat meningkatkan kapasitas produksi IPA *eksisting* hingga rata-rata dua kali lipat dari produksi awal dan menghasilkan kualitas air olahan sesuai baku mutu yang berlaku. (Indira/sumber: Balitbang)



Instalasi pengolahan air dari samping

Sumber: Istimewa

## Potret



Seni tradisi Betawi meramaikan pembukaan Expo 2018 Urbanscape.



Pengunjung dan petugas berdialog mengenai pembangunan infrastruktur di Booth Kementerian PUPR.



Pembukaan Expo 2018 Urbanscape dihadiri Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja.



Booth Kementerian PUPR melayani pengunjung yang menggali informasi mengenai infrastruktur perkotaan.



Pengunjung mendapat penjelasan mengenai pembangunan Anjungan Cerdas.

## BPIW IKUTI EXPO 2018 URBANSCAPE

Dalam rangka menyebarkan informasi produk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi BPIW dalam koordinasi Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR turut serta dalam Expo 2018 *Urbanscape* di Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang berlangsung pada (19-21/7) lalu. Dalam expo yang mengangkat tema "Greenery" tersebut, BPIW menampilkan panel pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Kabupaten Jembrana, Bali.



Penandatanganan serah terima jabatan disaksikan langsung Kepala BPIW, Hadi Sucahyono.



Penandatanganan serah terima jabatan dilakukan salah seorang pejabat baru di BPIW.



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sambutan.



Para hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat baru di BPIW Kementerian PUPR.



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis yang baru, Kuswardono menerima berkas laporan akhir kerja dari pejabat sebelumnya.

## SERAH TERIMA JABATAN DI BPIW

Semangat kebersamaan sangat mewarnai acara yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pejabat di lingkungan BPIW yakni Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.(Infobpiw)

# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



### PERTANYAAN

1. Apa kepanjangan dari KPPN?
2. Berapa banyak KPPN yang ditetapkan pemerintah?
3. Berapa KPPN yang disusun BPIW pada tahun 2018, sebutkan semuanya!

### KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id). Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 32, Agustus 2018.

### JAWABAN KUIS EDISI 30

Kata-kata yang terdapat dalam *scramble word* :

1. Kawasan	5. Program
2. Sektor	6. Renstra
3. Masterplan	7. Kota
4. Sinergi	8. Metropolitan

### PEMENANG KUIS EDISI 30

1. Asri Tristoko Jl. Pandu, kec. Rawa lumbu, Bekasi	
2. Grace Jl. Hidup Baru, Tangerang	

# Tiga Kunci Dasar Mendorong Organisasi Sukses

Dr Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT.

Kebudayaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diharapkan menjadi acuan perencanaan bagi seluruh unit organisasi teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dapat terwujud apabila BPIW Kementerian PUPR dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

Demi meningkatkan kinerja suatu organisasi termasuk organisasi BPIW, Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, BPIW Kementerian PUPR, Dr Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT. berkeyakinan, setidaknya diperlukan tiga komponen dasar dalam menggerakkan organisasi.

"Yang pertama adalah KISS. KISS itu merupakan singkatan dari Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Simplifikasi," ujar Ahli Analisis Kebijakan Publik ini. Ia melanjutkan, koordinasi merupakan proses kegiatan demi mencapai satu kesatuan antara berbagai macam pihak dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu sangat penting diterapkan untuk saling berkerjasama dalam mencapai tujuan.

Adapun Integrasi, lanjutnya, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. "Dengan begitu kinerja organisasi akan kuat," terangnya. Doedoeng menambahkan, untuk Sinergi merupakan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis diantara persona maupun bidang-bidang.

Kemudian simplifikasi, terang Doedoeng, simplifikasi merupakan penyederhanaan masalah. Hal ini sangat penting, untuk kelancaran organisasi. "Orang hebat itu menurut saya

sebenarnya, orang yang mampu menyajikan hal sederhana dari hal yang rumit, bukan sebaliknya. Jadi simplifikasi penting karena itu ciri dari kemampuan orang hebat. Organisasi yang didukung orang hebat itu kemungkinan akan hebat juga kinerjanya," yakin Ahli Ekonomi Pembangunan ini.

Untuk komponen kedua adalah manajemen organisasi. "Saya berkeyakinan suatu organisasi itu akan canggih, apabila dikelola oleh manajemen yang canggih, efektif dan efisien," terang pria asli Tasikmalaya, Jawa Barat ini.

Doedoeng menyatakan, adapun untuk elemen ketiga adalah spiritual religi. Dalam hal ini pengelola dan seluruh bagian organisasi perlu menjalani spiritual religi. "Sebagai orang yang beragama, saya yakin tataran manusia itu pada ikhtiar, sedangkan sukses atau tidaknya suatu hal itu pada tataran Tuhan, sehingga setelah kita kerja keras dan profesional, akhirnya kita memang perlu berdoa untuk meminta pertolongan kepada tuhan yang maha segalanya, agar hal yang kita usahakan dapat terwujud dengan baik," ujar Doedoeng.

Menurutnya, ketiga komponen itu akan menjadi kunci dasar untuk memajukan organisasi apapun dan dimanapun. "Baik organisasi swasta yang bertujuan bisnis ataupun organisasi pemerintah yang bertujuan melayani masyarakat dan memajukan negara," ungkap sarjana teknik alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB)

**"Saya berkeyakinan suatu organisasi itu akan canggih, apabila dikelola oleh manajemen yang canggih, efektif dan efisien," terang pria asli Tasikmalaya, Jawa Barat ini.**



## Termotivasi Melanggengkan Gagasan Melalui Tulisan

Doedoeng selama ini dikenal sosok yang rajin menulis di berbagai media. Baik jurnal, media intern maupun media massa nasional. Pria lulusan pasca sarjana ITB ini mengaku, motivasi terkuat dalam dirinya untuk selalu menulis adalah melanggengkan gagasan. Menulis juga merupakan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat

"Orang boleh ahli, kaya, pintar, berpangkat dan apapun, namun kalau tidak menulis jangan mengharap dapat melanggengkan gagasan. Sebab, satu-satunya cara melanggengkan gagasan adalah dengan menulis. Langgengnya gagasan seseorang itu akan membuat orang tersebut eksist walaupun secara jasad sudah tiada atau wafat," papar Doedoeng.

Dengan begitu, lanjutnya, menulis itu perlu. "Agar hasil karya kita itu dapat dikenang orang, bukan hanya generasi kita, namun generasi anak cucu kita dan seterusnya," terang pria yang pernah menjadi profesional di berbagai perusahaan besar di dalam negeri.

Ia melanjutkan, manfaat lain dari menulis adalah sebagai sarana pertukaran informasi yang efektif dan efisien. Lewat sebuah tulisan, penulis dapat menyampaikan

informasi yang luas dan panjang. "Kemudian bukan hanya pada yang membacanya, namun juga kepada orang yang mendengarkan pembicaraan dari orang membaca tulisan kita," ungkapny.

Terlebih tulisan itu merupakan karya yang dimungkinkan untuk diperbanyak dan mudah untuk disebarluaskan agar lebih banyak lagi orang yang membacanya.

"Saya masih sangat terobsesi untuk menuliskan sejumlah pengalaman atau gagasan monumental diri sendiri dalam sebuah buku, semoga beberapa waktu kedepan obsesi saya itu dapat terwujud," harap Doedoeng.

**"Saya masih sangat terobsesi untuk menuliskan sejumlah pengalaman atau gagasan monumental diri sendiri dalam sebuah buku, semoga beberapa waktu kedepan obsesi saya itu dapat terwujud," harap Doedoeng.**

Di sisi lain kehidupannya, Doedoeng mengaku sebagai orang yang kerap disibukkan dengan dinas keluar kota. "Kendati sibuk dengan perjalanan keluar kota, namun hubungan dengan keluarga tetap hangat dan baik," terang Doedoeng.

Ia mengaku, salah satu kunci agar kehangatan dan

keharmonisan keluarga tetap terjaga adalah dengan senantiasa membangun komunikasi yang positif. "Hal ini semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para junior, bahwa komunikasi dengan keluarga itu sangat penting, agar keluarga tetap harmonis. Kondisi keluarga yang harmonis sangat mendukung terhadap loncatan pencapaian seseorang," terang Doedoeng. **(Ris/InfoBPIW)**



**Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:  
[bpiw.pu.go.id/publication/bulletin](http://bpiw.pu.go.id/publication/bulletin)**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**

